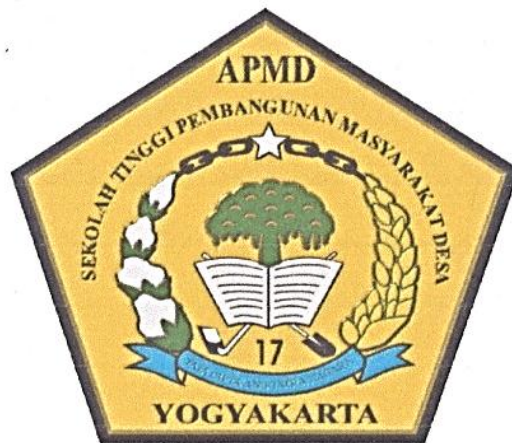


**DOMINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGEMBANGAN WISATA GOA SELARONG DI
KALURAHAN GUWOSARI**

**(Studi Penelitian di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten
Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)**



Disusun Oleh:

**APRIANUS KURA
21520053**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU (S-1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2025



HALAMAN JUDUL

DOMINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN

WISATA GOA SELARONG DI KALURAHAN GUWOSARI

(Studi Penelitian di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Disusun Sebagai Tugas Akhir untuk Memenuhi Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Stara Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU (S-1)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Juli 2025

Jam : 10.30

Tempat : Ruangan Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

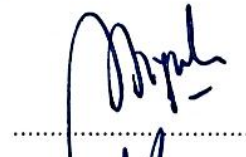
Drs. R. Y Gatot Raditya., M. Si

Ketua Penguji/ Pembimbing I



Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat

Penguji samping II



Analius Giawa, S.IP., M. Si

Penguji Samping III



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.

0511087301

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“DOMINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN WISATA GOA SELARONG DI KALURAHAN GUWOSARI”** yang berstudi penelitian di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah benar karya tulis saya sendiri yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata Satu (S-1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Semua sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan atau plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta 10 Juli 2025



Penulis

Aprianus Kura

21520053

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Aprianus Kura
NIM : 21520053
Telp : 0821-3909-0122
Email : aprianuskura@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta** untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"(Dominasi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Wisata Goa Selarong (Studi Penelitian Di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta))"

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 10 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Aprianus Kura
NIM, 21520053

MOTTO

“Jatuh bangun itu biasa, yang luar biasa adalah tetap melanjutkan.”

“Berbahagialah orang yang tekun dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan.” *Yakobus 1:12*

(APRI KURA)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh ucapan syukur dan rasa limpah terima kasih, karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu melindungi, menyertai dan memberikan nafas kehidupan sampai dengan saat ini.
2. Kedua orang tua saya: Bapak Anderias Kura dan Ibu Derniati Deghu Kaka. Limpah Terima Kasih atas ketulusan cinta dan kasih yang tidak ada batasnya yang saya terima. Segala perjuangan ini saya persembahkan untuk kalian. Sekali lagi Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan semangat hidup saya.
3. Untuk saudara saya, Adik Linus Kura, Nita Kura, Vian Kura, Farel Kura, Nela Kura, yang selalu semangat dengan menghidupi mimpi yang sama. Kasi dan cinta kalian sangat luar biasa dalam hidup saya.
4. Untuk keluarga besarku, Terima Kasih atas doa, dukungan, dan cinta yang tak pernah putus. Semua langkahku hari ini adalah hasil dari kebersamaan dan kebanggaan menjadi bagian dari kalian.
5. Untuk adik Timo, Kita tak hanya lahir dalam keluarga yang sama, Tapi juga dipertemukan dalam perjuangan yang serupa. Kita terus melangkah, walau dunia tak selalu ramah. Untuk Teman seperjuangan yang tak terganti, Terima kasih karena telah menjadi bagian dari setiap detak tekad ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“DOMINASI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN WISATA GOA SELARONG DI KALURAHAN GUWOSARI”** Sehingga skripsi ini bisa dijadikan sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan segala kekurangan. Penulis juga menyadari bahwa karya tulis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang sudah mendukung selesainya penulisan skripsi ini dengan baik. Maka dengan besar hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat untuk menimba ilmu dan pengalaman akademik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M. Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. selaku Ketua Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Bapak Drs. R. Y Gatot Raditya., M. Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan, serta gagasan yang mendukung hingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat, selaku dosen penguji 1 yang telah menguji hasil penelitian.
6. Bapak Analius Giawa, S.IP., M. Si, selaku dosen penguji 2 yang telah menguji hasil penelitian.
7. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya selama penulis mengenyam pendidikan.
8. Untuk Kaka Boming, Kaka Vian, Terima kasih sudah menjadi bagian penting dalam hidup saya selama saya berada di kota istimewa Yogyakarta. Kalian

hadir bukan hanya sebagai teman dan saudara, tapi juga sebagai rumah ketika dunia terasa asing. Semoga langkah kita selalu diberkati, dan ikatan ini tak lekang oleh waktu.

9. Untuk keluarga besar Sumba APMD, KMKY, dan teman-teman FMN. Organisasi yang telah menjadi tempat saya tumbuh dan belajar, Terima kasih atas setiap kesempatan, bimbingan, dan kebersamaan. Semangat ini akan terus saya bawa kemanapun langkah kaki melangkah.
10. Untuk Kaka-kaka, teman-teman semua, selo, josua, adi holo, ergen, danto, herti, yere, oce, heru, dan masih banyak lagi lainnya yang tidak bisa saya sebut namanya satu-persatu disini. Segala kebaikan dan jasa kalian semua selalu ada dalam hati saya, dan segala niat baik kalian semua diberkati selalu oleh tuhan yang maha kuasa.
11. Seluruh staf pegawai Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta atas segala pelayanan yang telah diberikan selama ini guna untuk menunjang kegiatan perkuliahan.
12. Pemerintah Kalurahan Guwosari, serta Masyarakat Guwosari sebagai tempat penelitian, dan juga ikut membantu penulis untuk memberikan informasi dan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis akan selalu terbuka dan mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, sehingga akan menjadi pelajaran bagi penulis. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Yogyakarta 10 Juli 2025

Aprianus Kura

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
INTISARI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Fokus Penelitian.....	10
D. Tujuan penelitian	10
E. Manfaat penelitian	10
F. Literature Review.....	11
G. Kerangka Konsep.....	20
H. Metode Penelitian	32
1. Jenis Penelitian	33
2. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3. Teknik Analisis Data	36
BAB II DESKRIPSI WILAYAH PEMERINTAH KALURAHAN	
GUWOSARI.....	39
A. Sejarah Kalurahan Guwosari	39
B. Kondisi geografis desa	43
C. Kondisi Demografis	45
D. Kondisi Ekonomi Kalurahan Guwosari	53
E. Sarana Prasarana Desa dan Budaya Kalurahan Guwosari	57
F. Profil Pemerintah Kalurahan.....	62

G. Struktur Organisasi Pengelolaan Goa Selarong.....	68
H. Wisata Goa Selarong.....	69
BAB III PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM	
PENGEMABANGAN WISATA GOA SELARONG	71
A. Pemerintah Kalurahan sebagai fasilitator dalam Pengembangan wisata Goa Selarong.....	71
B. Kebijakan Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan wisata Goa Selarong	75
C. Pengorganisasian dalam Pengembangan Wisata Goa Selarong	92
D. Pemerintah Kalurahan sebagai motivator dalam pengembangan wisata Goa Selarong.....	97
E. Pemerintah Kalurahan sebagai Inovator dalam Pengembangan Wisata Goa Selarong	103
BAB IV PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	120

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Nama Informan.....	31
Tabel 2.1 Kepemimpinan Lurah Guwosari	37
Tabel 2.2 Penduduk Berdasarkan Gender.....	41
Tabel 2.3 Mata Pencarian Penduduk.....	42
Tabel 2.4 Penduduk Berdasarkan agama	44
Tabel 2.5 Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	44
Tabel 2.6 Kualitas Penduduk Angkatan Kerja.....	46
Tabel 2.7 Data Penduduk Cacat Mental dan Fisik.....	47
Tabel 2.8 Tenaga Kesehatan dan Balai Pengobatan	53
Tabel 2.9 Sarana dan Prasarana Pendidikan	53
Tabel 2.10 Sarana dan Prasarana Olahraga Guwosari	55
Tabel 2.11 Budaya Kalurahan Guwosari	56
Tabel 2.12 Sarana dan Prasarana LK Kalurahan Guwosari.....	57
Tabel 2.13 Pemerintah Kalurahan Guwosari	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kalurahan Guwosari	39
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Guwosari	63
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Pengelolaan Goa Selarong	64

INTISARI

Pemerintah Kalurahan Guwosari memiliki peran penting untuk membantu dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata Goa Selarong. Pemerintah Kalurahan mempunyai hak untuk merencanakan, mengelola, dan mengembangkan destinasi wisata di wilayahnya, dengan memperhatikan kepentingan lokal dan partisipasi masyarakat. Selain itu, pemerintah kalurahan juga dapat mengelola anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur wisata, seperti sarana transportasi, fasilitas umum, dan promosi pariwisata.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan objek penelitian berdasarkan fenomena, peristiwa, atau keadaan yang sedang berlangsung, dengan dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan menjelaskan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk kemudian dianalisis sesuai dengan teori yang ada.

Hasil penelitian Pemerintah Kalurahan belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak utama dalam pengelolaan wisata. Meskipun dalam kondisi yang terbatas, Pemerintah Kalurahan Guwosari tetap menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan wisata melalui berbagai cara, seperti mengadakan pelatihan, pembentukan Pokdarwis, mendorong keberadaan BUM Kalurahan, serta melakukan promosi melalui media sosial. Selain itu, tidak adanya kebijakan khusus dari Pemerintah Kalurahan yang mengatur secara rinci mengenai pengembangan wisata berbasis lokal juga menjadi faktor yang menghambat terciptanya kolaborasi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah desa.

Kata kunci: Dominasi, Pengembangan Pariwisata, Pemerintah Kalurahan Guwosari

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara berkembang dengan sektor pariwisata yang sedang berkembang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman kebudayaannya. Dengan kekayaan alam dan kebudayaan yang beragam tentu sangat berpotensi untuk menjadikan wisata. Dengan demikian diperlukan pengelolaan yang baik agar supaya dapat menjadi sebuah potensi besar untuk menjadikan nilai daya tarik terhadap pengelolaan dan pengembangan keberlanjutan. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 tentang kepariwisataan, dijelaskan bahwa Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Pengembangan Pariwisata merupakan suatu langkah yang tepat dan menjadi pendukung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat apabila potensi alam dapat dikelola dengan baik. Dengan demikian, pengembangan pariwisata sangat perlukan di kembangkan untuk memberikan dampak positif ke masyarakat terutama dalam mendorong perputaran ekonomi masyarakat serta menjadi pendapatan pemerintah desa. Dalam pengembangan pariwisata juga tidak terlepas dari dukungan seperti pembangunan manusia

dalam bentuk peningkatan kualitas pengelola wisata dan juga pembangunan dapat terlihat secara nyata didukung dari segi fasilitasnya yaitu adanya revitalisasi dari segi aspek sosial, ekonomi dan pembangunan.

Pariwisata merupakan Potensi yang mampu menggerakkan berbagai sektor secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kekayaan alam, budaya, dan keragaman tradisi yang dimiliki, pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling menjanjikan untuk dikembangkan. Dapat diketahui bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Sektor ini tidak hanya memberikan sumber devisa terhadap negara, tetapi bisa memberikan kesempatan terbukanya lapangan kerja dan dapat meningkatkan mutu kehidupan masyarakat terutama yang berada daerah di perdesaan.

Menurut Arliman, (dalam Alfianto, Ferbiansyah Yona, 2021:2) menjelaskan, Pariwisata memiliki banyak manfaat dari adanya suatu tempat wisata yaitu suatu rangkaian proses pembangunan, yang menyangkut dari segi sosial, ekonomi dan politik. Salah satu menjadi upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi daya tarik wisata yaitu dengan cara melaksanakan secara maksimal peran pemerintah dalam kegiatan kepariwisataan. Pada prinsipnya tujuan akhir dari pengelolaan pariwisata adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi dengan pelayanan kepada wisatawan serta perlindungan terhadap lingkungan dan pelestarian keberagaman budaya. Demikian juga dalam pengembangan pariwisata tersebut perlu kerjasama yang solid antara Pemerintah dan

masyarakat untuk bersama-sama membangun serta melindungi kawasan. Hal tersebut pemerintah desa memiliki peran penting yang sangat diperlukan dalam menciptakan kondisi yang mendukung perkembangannya pariwisata.

Peran pemerintah desa sebagai unit terendah yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, memiliki potensi besar untuk membantu dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pariwisata tersebut. Menurut, Hidayat, (dalam, Nadinda Shinta Fahira, Rusdianto Umar, Muhammad Mujtaba Habibi, 2022:292), menjelaskan bahwa, Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi wisata. Pemerintah desa berperan sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan diharuskan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga untuk dapat menjalankan peran dan tanggung jawab tersebut diperlukan kecakapan, sikap, dan pengetahuan tentang perihal yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal dengan optimal. Dalam pengembangan pariwisata pemerintah desa mempunyai kewenangan dan peran dalam menyusun perencanaan yang meliputi:

1. Perencanaan dan pengawasan untuk membuat rencana pengembangan yang terpadu dan menjaga agar pengembangan pariwisata tidak merusak lingkungan dan budaya lokal.
2. Pembangunan Infrastruktur, untuk meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas pendukung pariwisata, seperti jalan, tempat parkir, dan fasilitas publik.

3. pemberdayaan masyarakat, untuk Melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata, baik melalui penyediaan layanan maupun produk lokal yang dapat dijual kepada wisatawan.
4. promosi dan pemasaran, untuk mempromosikan destinasi wisata yang menarik baik melalui media sosial, kerjasama dengan agen perjalanan, maupun acara lokal.

Hal tersebut berdasarkan perencanaan dengan peranan ini sangat penting dalam upaya pengembangan objek wisata dan menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat dipedesaan yang dilakukan melalui pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Menurut Subadra (2007) dalam kegiatan pariwisata pemerintah memiliki peran penting dan bertanggung jawab atas 4 hal utama yaitu sebagai perencana (Planning), pembangunan (Development) fasilitas utama maupun fasilitas pendukung pariwisata, penentu kebijakan (Policy) dan penegakan peraturan (Regulation).

Pemerintah Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. pemerintah desa dalam pengembangan pariwisata semakin penting seiring dengan desentralisasi yang memberi ruang bagi desa untuk mengelola potensi lokal. Pemerintah desa mempunyai hak untuk merencanakan, mengelola, dan mengembangkan destinasi wisata di wilayahnya, dengan memperhatikan kepentingan lokal dan partisipasi masyarakat. Selain itu, mereka juga dapat mengelola anggaran yang

dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur wisata, seperti sarana transportasi, fasilitas umum, dan promosi pariwisata. Pemerintah desa juga dapat berkolaborasi dengan sektor swasta atau lembaga lain dalam mengembangkan daya tarik wisata yang mendukung perekonomian lokal, sekaligus mengurangi kemiskinan.

Keberadaan desa sebagai entitas otonom dalam struktur pemerintahan Indonesia semakin ditegaskan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menekankan prinsip rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak-hak asli yang dimiliki desa sejak dahulu, serta prinsip subsidiaritas yang memberikan keleluasaan bagi desa untuk mengelola urusan internalnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Demikian dengan adanya pengakuan atas kewenangan pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, tentu dasar ini menjadi acuan bahwa negara bertanggung jawab atas kemakmuran rakyatnya, hingga kemudian memberikan peluang besar pemerintah desa untuk mengelola potensi yang ada di wilayahnya.

Kalurahan Guwosari merupakan salah satu desa wisata yang ada di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Potensi desa yang beragam membuat masyarakat sekitar semakin berinovasi untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Kalurahan Guwosari sekaligus menunjang perekonomian masyarakat Kalurahan Guwosari. Kalurahan Guwosari sendiri sudah memiliki beberapa wisata yang menjadi andalan untuk menarik minat para wisatawan, contohnya wisata kuliner Ingkung Kualo,

Pancuran noni-noni, mata air Telaga Santen, beserta gua selarong itu sendiri. Pengembangan dan pengelolaan desa wisata ini tidak hanya melibatkan Pemerintah Kalurahan, namun juga melibatkan dinas pariwisata daerah, peran serta masyarakat melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Kolaborasi antara Pemerintah Kalurahan, dinas pariwisata daerah dan beserta POKDARWIS menjadi suatu strategi manajerial yang penting agar pembangunan dan pengelolaan desa wisata dapat terlaksana dengan baik.

Objek wisata Goa Selarong memiliki koneksi sejarah yang kuat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dimana pada waktu itu Pangeran Diponegoro dan pasukannya bergerak ke arah selatan dan membangun basis militer di Goa Selarong yang terletak lima kilometer dari arah Kota Bantul. Strategi gerilya yang diterapkan Pangeran Diponegoro berhasil mengecoh Belanda dan membuatnya licin sulit tertangkap. Goa selarong merupakan markas kediaman pangeran diponegoro bersama pasukannya saat melakukan aksi perang gerilya melawan penjajah Belanda. Dengan adanya perlawanan lalu menyusun aksi balasan dari pangeran diponegoro bersama pasukannya yang merupakan bentuk kedendamannya terhadap Belanda yang telah membakar habis rumahnya di Tegalrejo. Goa Selarong sendiri terdapat dua Goa utama yaitu Goa Kakung dan Goa Putri. Goa Kakung merupakan tempat kediaman Pangeran Diponegoro. Sedangkan Goa Putri dipergunakan merupakan sebagai tempat tinggal Raden Ayu Ratnaningsih. Beliau adalah selir pangeran yang paling setia setelah kedua istrinya meninggal dunia. Pangeran Diponegoro

mengobarkan semangat perjuangan rakyat pribumi dengan semboyannya, sadumuk bathuk sanyari bumi dikahi tekan pati. Artinya, sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Oleh karena itu dengan sejarah yang menarik dan unik bisa menjadikan daya tarik para wisatawan ketika berkunjung di objek wisata.

Objek Wisata Goa Selarong sudah ditetapkan pada tahun 2022 sebagai wisata cagar budaya. masih memiliki kendala atau permasalahan yang terjadi ialah sumber daya manusia yang masih sangat minim dan belum memahami tentang pengembangan pariwisata. Kemudian infrastruktur sebagai pendukung dalam pengembangan pariwisata masih kurang seperti tempat menginap, beristirahat sehingga kunjungan wisatawan terbilang sangat terbatas dan hampir semua hanya berkunjung harian saja. Hal ini kemudian menjadi salah satu kendala bagi pemerintah desa guwosari untuk mengambil langkah-langkah dengan melibatkan masyarakat untuk turut mempengaruhi kelancaran terhadap pengembangan objek wisata yang berada di Goa Selarong. Dengan demikian, peran pemerintah desa memiliki kedudukan yang penting dalam melakukan pengembangan objek wisata Goa Selarong, baik sebagai pihak yang mempromosikan, mengelola sekaligus menjadi pemberi arahan kepada masyarakat untuk turut serta dalam melakukan pengembangan.

Namun dalam pengembangan objek wisata di Goa Selarong sebagai cagar budaya di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, DIY, sejauh ini pengelolaannya masih belum optimal. disisi lain juga bahwa Wisata Goa Selarong secara langsung masih dikelola oleh dinas

Pariwisata Kabupaten Bantul melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 23 Tahun 2024 Tentang perubahan tarif redistribusi jasa usaha kepariwisataan, sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan kepariwisataan yang berbasis budaya dan memberikan daya tarik wisatawan mancanegara. Meskipun langkah-langkah tersebut mempunyai legalitas dalam pengembangan wisata Goa Selarong, namun pada sisi lain muncul fenomena dominasi pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan dan pengembangan destinasi. Dominasi ini dapat memperlemah keterlibatan pemerintah kalurahan dan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengelolaan. Hal ini, imbasnya banyak program dan kebijakan yang lebih bersifat top-down, tanpa memperhatikan secara memadai aspirasi dan kapasitas aktor lokal. Padahal, keberhasilan pengembangan wisata yang berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha lokal, dan masyarakat setempat. Sementara itu pemerintah desa atau yang disebut kalurahan, tidak hanya membantu mempromosikan melalui media sosial dan memberikan pelatihan kepada warga masyarakat, beserta mendorong warga masyarakat ikut terlibat dalam pengembangan Wisata Goa Selarong tersebut.

Wisata yang ada di Kalurahan juga, tidak hanya fokus pada kawasan wisata yang menawarkan nuansa pedesaan. Hal ini, Penguatan posisi desa dalam sistem pemerintahan nasional tercermin jelas melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mengakui keberadaan dan kewenangan desa

berdasarkan hak asal-usul serta memberi ruang bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya secara mandiri sesuai dengan prinsip lokalitas dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam pengembangan wisata peran pemerintah desa seharusnya menjadi aktor utama dalam pembangunan dan pengelolaan pariwisata, sehingga dapat berperan sebagai pelaku utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat desanya. Selain itu juga, objek wisata Goa Selarong masih memiliki keterbatasan di infrastruktur sebagai bahan penunjang dalam pengembangan wisata. Hal ini menunjukkan dapat memperlemah pengembangan wisata dan perlu menjadi perhatian khusus baik pemerintah kalurahan, kabupaten maupun provinsi dalam mendukung pengembangan pariwisata di Goa Selarong.

Dengan berdasarkan uraian diatas yang memperlihatkan dengan potensi keunikan sejarah wisata Goa Selarong. Demikian, namun dalam pengembangan pariwisata sejauh ini belum begitu maksimal untuk di kembangkan. maka peneliti berupaya menarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dominasi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan wisata Goa Selarong di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarikan rumusan masalah yakni “Bagaimana Dominasi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Wisata Goa Selarong di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.?”

C. Fokus Penelitian

Dengan berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, untuk melihat mengenai peran pemerintah Kalurahan Guwosari dalam pengembangan pariwisata Goa Selarong. Maka dengan demikian sangat diperlukan untuk diteliti. Adapun subfokus penelitian tersebut antara lain:

1. Pemerintah Kalurahan sebagai fasilitator dalam pengembangan wisata Goa Selarong
2. Kebijakan Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan wisata Goa Selarongn
3. Pengorganisasian dalam pengembangan wisata Goa Selarong
4. Pemerintah Kalurahan sebagai motivator dalam pengembangan wisata Goa Selarong
5. Pemerintah Kalurahan sebagai inovator dalam pengembangan wisata Goa Selarong

D. Tujuan penelitian

Untuk mendeskripsikan “bagaimana Dominasi Pemerintah daerah dalam Pengembangan Wisata Goa Selarong di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”.

E. Manfaat penelitian

Dalam manfaat penelitian ini ada dua yakni; teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam pengembangan Wisata Goa Selarong di Kalurahan Guwosari.
- b. Untuk meminimalisir masalah-masalah terkait dalam pengembangan Wisata Goa Selarong di Kalurahan Guwosari.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan tambahan pengetahuan terhadap masyarakat dalam bidang pengembangan pariwisata.
- b. Dengan diadakan penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap pemangku kebijakan khususnya instansi terkait dalam pengembangan pariwisata.

F. Literature Review

Mengenai penelitian ini berisi uraian hasil penelitian dari sejumlah peneliti terdahulu, yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang nanti akan dilakukan. Hal tersebut, dengan penelitian terdahulu tentu menjadi suatu acuan referensi untuk mengembangkan penelitian yang ada menjadi penelitian terbaru.

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susi Iswanti & Zulkarnaini, (2022) dengan judul tentang “Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir”. Tujuan Penelitiannya ini untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata pulau tilan dan mengetahui apa saja yang menjadi

faktor-faktor penghambat pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata pulau tilan di kepenghuluan rantau bais kecamatan tanah putih kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori pitana dan gayatri (2005) yang memiliki tiga (3) komponen indikator yaitu, motivator, fasilitator dan dinamisor. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun sudah berjalan sesuai peran sebagai indikator-indikator yang telah ditetapkan, akan tetapi masih terdapat sedikit kekurangannya, sehingga masih dikatakan belum maksimal. Adapun faktor penghambatnya yaitu sebagai berikut, kurangnya modal dalam pengembangan objek wisata, rendahnya sumber daya manusia, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata.

Artinya dari tiga (3) penyebab yang menjadi penghambat dalam pengembangan pariwisata ini, bisa dikatakan bahwa pemerintah desa kurang relasi dalam pengembangan pariwisata sehingga berdampak pada kurang modal, minimnya sumber daya manusia, serta dalam partisipasi masyarakat yang kurang. Dengan demikian untuk memaksimalkan dalam pengembangan objek wisata tidak hanya peran pemerintah desa semata yang mengelolanya, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dan pihak lainnya untuk bekerja sama dalam pengembangan wisata.

2. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Rohani Inta Dewi, dan Wisnu Khairan, (2024), dengan judul tentang Peran Pemerintah Desa Sedau dalam Pengembangan Destinasi Wisata Gunung Jae. Tujuan penelitiannya untuk mengevaluasi peran Pemerintah Desa Sedau dalam pengembangan Objek Wisata Gunung Jae dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses tersebut. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Sedau dalam pengembangan objek wisata Gunung Jae telah berjalan sesuai dengan indikator yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang menghambat pencapaian hasil yang optimal. Hal yang menjadi penghambat utama meliputi keterbatasan modal untuk pengembangan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan mengenai pariwisata.

Hal tersebut sedikit berbeda, namun hampir sama penyebab dalam pengembangan wisata dari hasil penelitian oleh, Susi Iswanti dan Zulkarnaini, (2022), tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Yakni perbedaanya karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata, sedangkan kesamaannya yakni, kekurangan modal dalam pengembangan pariwisata, serta minimnya sumber daya manusia (SDM). dari hasil penelitian oleh Rohani Inta Dewi, dan Wisnu Khairan, (2024), ini menunjukkan bahwa pemerintah

desa bisa dikatakan kurang komunikasi yang efektif untuk membangun relasi dari beberapa pihak yang bisa menopang dalam pengembangan wisata, sehingga berdampak pada kekurangan modal dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. sehingga bisa dikatakan bahwa pemerintah desa belum mampu untuk mengelola dan mengembangkan suatu potensi yang ada di wilayahnya dengan optimal. Dengan demikian untuk memaksimalkan dalam pengembangan objek wisata tidak hanya peran pemerintah desa semata yang mengelolanya, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dan pihak lainnya untuk bekerja sama dalam pengembangan wisata.

3. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Alesandro Pendong, Frans Singkoh, Fanley Pangemanan, (2020), dengan judul tentang Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Gunung Payung Di Desa Poopo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan pemerintah dalam pengembangan pariwisata Gunung Payung di Desa Poopo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat mengeksplorasi masalah sehingga akan diperoleh jawaban dari masalah penelitian melalui informasi yang disampaikan oleh informan penelitian. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Poopo telah mengupayakan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dengan mempertontonkan tari-tarian budaya yang diperagakan oleh

masyarakat Desa Poopo itu sendiri. Objek dan atraksi wisata ini termasuk produk industri pariwisata yang memotivasi wisatawan untuk berkunjung ke daerah wisata gunung paying, serta pemerintah desa dan masyarakat telah menyediakan alat transportasi guna menunjang wisatawan untuk menuju lokasi objek wisata gunung payung. Alat transportasi saat ini yang disediakan merupakan kendaraan roda dua yang dapat disewa oleh para wisatawan untuk menuju lokasi wisata jika tidak ingin berjalan kaki.

Artinya dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antara kerja sama masyarakat dan pemerintah desa merupakan bentuk dimana untuk menjaga perkembangan dan pelestarian wisata. Dengan begitu antusiasnya masyarakat untuk menyumbangkan sesuatu dalam pengembangan pariwisata, tentu ini merupakan suatu keberhasilan pemerintah desa dalam membangun kerja sama yang baik dengan masyarakat. Oleh karena itu di dalam pengembangan pariwisata tidak hanya melihat seberapa mampu keberhasilan pemerintah desa dalam pengembangan pariwisata, tapi juga bisa dilihat bahwasannya seberapa besar dampak pengembangan wisata terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Al Araf, Muh. Jamal, Iman Surya, (2022), dengan judul Peran Kepala Desa Dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Luan Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser. Tujuan penelitiannya untuk mengidentifikasi dan

Menggambarkan peran kepala desa dalam pengembangan pariwisata di Desa Luan, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser. Penelitian ini menggunakan tiga indikator peran kepala desa, yaitu motivator, fasilitator, dan mobilisator, dan bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung yang menghambat pendanaan dalam pengembangan pariwisata di Desa Luan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam pengembangan pariwisata sudah berjalan dengan baik, di mana kepala desa sebagai motivator selalu memberikan motivasi, semangat, dan masukan kepada perangkat desa dan masyarakat desa. Kepala desa juga berperan sebagai fasilitator dengan menjadi sumber daya yang baik untuk menyelesaikan masalah dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan alat dan bahan untuk pembuatan fasilitas. Namun Faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata adalah status kepemilikan tanah, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan pariwisata, serta kurangnya fasilitas dan infrastruktur.

Tantangan yang dihadapi oleh kepala desa adalah bagaimana kemudian agar menemukan solusi yang baik terkait status kepemilikan tanah, terus kemudian bagaimana agar supaya kesadaran masyarakat dapat membaik untuk menjaga dan melestarikan pariwisata, beserta dengan kebutuhan fasilitas dalam mendukung kebutuhan pariwisata. Artinya dalam penelitian ini yang ditemukan oleh peneliti, lebih melihat

peran kepala desa dan faktor terhambatnya dalam pengembangan pariwisata.

5. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Idrus, I. A., & Hakim, M. L. (2024), dengan judul Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Wisata Sawah Desa Gunung Mulia Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata sawah Desa Gunung Mulia yang memiliki keindahan alam yang asri, faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata sawah Desa Gunung Mulia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memanfaatkan jenis penelitian deskriptif. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa wisata sawah desa Gunung Mulia memiliki banyak sekali daya tarik bagi wisatawan yang dapat terus dikembangkan agar dapat menambang minat para wisatawan untuk berkunjung. Upaya yang dapat terus dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu dengan membuat sebuah kebijakan pengembangan dan terus melakukan pembangunan infrastruktur yang lengkap berupa sarana dan prasarana, dan pembangunan fasilitas umum yang sangat penting untuk memberikan kenyamanan bagi para wisatawan. Namun demikian dalam pengembangan wisata sawah desa gunung mulia masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa yaitu sumber daya manusia yang masih terbilang kurang mempunyai pengetahuan dalam mengembangkan wisata, dan

kurangnya media promosi yang mana hanya melalui instagram, facebook, dan youtube saja.

Hal ini menunjukkan bahwasanya peran pemerintah desa gunung mulia dalam pengembangan wisata sawah masih terbilang belum optimal. Dalam pengembangan wisata tidak hanya berfokus pada promosi melalui, instagram, facebook, dan youtube, yang perlu dilihat oleh pemerintah desa adalah bagaimana kemudian kesadaran masyarakat setempat dalam keterlibatan pengembangan dan pelestarian wisata, jika kemudian terdapat hambatan sumber daya manusia (SDM) yang masih minim, maka pemerintah desa diperlukan terus-menerus mendorong masyarakat melalui sosialisasi dengan memberikan pencerahan dan pemahaman untuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengembangan wisata.

6. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sopyan, M., Nursetiawan, I., & Garis, R. R. (2024), Dengan judul Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pasir Bentang di Desa Sukamnah Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek wisata Pasir Bentang di Desa Sukamanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data

hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemerintah desa belum optimal melaksanakan perannya dalam mengembangkan objek wisata Pasir Bentang mengingat terdapat beberapa indikator dari dimensi peran yang belum optimal sehingga menyebabkan pengembangan objek wisata Pasir Bentang kurang sesuai dengan yang diharapkan hal ini antara lain kurang mendapat respon masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pengembangan objek wisata serta kurangnya peran aktif dalam mengelola objek wisata. Keterbatasan anggaran sehingga belum optimal dalam melakukan penataan objek wisata Pasir Bentang selain itu kerjasama yang terjalin antara pokdarwis dan LMDH belum dapat meningkatkan pengembangan objek wisata karena kurangnya kewenangan yang jelas dalam pengelolaan objek wisata. Serta kurangnya mendorong keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan kelestarian dan kebersihan di objek wisata Pasir Bentang serta belum didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman terhadap konsep pengelolaan wisata sehingga kegiatan promosi pariwisata belum dilaksanakan secara rutin.

Berdasarkan hasil kajian literatur review di atas yang berfokus pada peran pemerintah desa dalam pengembangan pariwisata. Oleh karena itu justru ini kajian berbeda dengan kajian sebelumnya, kajian ini berangkat dengan persoalan bagaimana peran pemerintah desa dalam

pengembangan pariwisata goa selarong yang berada di kalurahan guwosari.

G. Kerangka Konsep

1. Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan sebuah struktur organisasi pemerintahan yang berada di tingkat desa atau kalurahan. Dalam UU Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) mengatur tentang rekognisi dan subsidiaritas dalam konteks desa. Rekognisi berarti pengakuan terhadap hak asal-usul desa, sementara subsidiaritas berarti kewenangan desa dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri, dengan prioritas pada tingkat lokal. Selanjutnya juga Menurut, purnawati, (2019), menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa.

Pemerintah merupakan sebuah lembaga atau organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dalam suatu negara, wilayah, atau komunitas.

Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan tatanan sosial, menjaga ketertiban, serta memberikan layanan dan perlindungan bagi warganya. Secara umum, tujuan utama pemerintah adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan di tingkat desa. Pemerintah desa berada dibawah kewenangan kabupaten/kota dan diatur oleh undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan desa. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik.

2. Peran Pemerintah Desa

a. Pengertian Peran

Konsep peran merupakan kata dasar peranan yang Menurut KBBI (Hidayat & Djadjuli, 2020) merupakan perangkat tindakan yang diharapkan dimiliki oleh orang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa dalam menyelesaikan sebuah kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menyamai kedudukan dalam urusan kehidupan sosialnya.

Dengan demikian, antara peran dan kedudukan merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari setiap individu atau kelompok. Hal tersebut, untuk mendapatkan peran dan kedudukan,

maka setiap individu atau kelompok ketika melaksanakan hak dan kewajibannya ia akan memperbaiki peranannya, begitu juga ketika individu atau kelompok menginginkan peranan maka tentu akan memperbaiki kedudukannya. Jadi peran dan kedudukan merupakan serangkaian yang melekat pada diri setiap individu ataupun kelompok.

Berdasarkan dengan peranan di atas, hal ini juga disampaikan Menurut Soekanto (2002), menjelaskan bahwa Peran mencakup tiga hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial Masyarakat. Hal tersebut berdasarkan tiga (3) peran di atas, sebagai manusia sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lainnya, tentu begitu penting untuk diterapkan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Menurut Santosa, (dalam Neng Yeyet, 2019:261), dalam mengenai peranan ini, mengemukakan beberapa dimensi peran, yakni sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Dalam paham ini berpandangan bahwasannya peran adalah sebuah hal kebijakan yang tepat sasaran dan baik untuk diimplementasikan.
- 2) Peran sebagai strategi. Dalam paham ini berpandangan bahwasannya peran adalah strategi untuk menyelesaikan sebuah tujuan yang dilakukan guna mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. oleh karenanya dengan pandangan ini bahwa dalam keputusan strategi dapat menjadi solusi yang baik dengan tujuan baik untuk kepentingan bersama dalam urusan bersosial dan bermasyarakat, tentunya dengan keputusan ini memiliki manfaat.
- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran dipergunakan untuk sebagai instrumen upaya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Pandangan ini didasarkan pada pemikiran bahwasannya pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat bukan untuk dilayani, sehingga opini dan masukan dari masyarakat dianggap sebagai sumber informasi yang penting untuk menciptakan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab.

- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui peran ini bertujuan untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih besar, mempercepat proses penyelesaian, dan memastikan bahwa hak serta kepentingan semua pihak terakomodasi. Pendekatan ini mengutamakan dialog dan negosiasi, yang diharapkan dapat menciptakan solusi yang saling diterima tanpa harus mengandalkan jalur hukum yang panjang dan rumit.
- 5) Peran sebagai terapi. Dalam pandangan ini bahwasannya peran sebagai terapi melihat pada pemulihan dan pengembangan individu agar dapat mengatasi masalah yang mengganggu kesejahteraan mereka, baik itu melalui pendekatan profesional atau kegiatan yang mendukung kesehatan mental dan emosional. Dalam hal ini, terapis berfungsi sebagai fasilitator dalam proses penyembuhan mental.

b. Peran Pemerintah Desa

Peran ini tidak hanya administratif, tetapi juga bersifat partisipatif dan inovatif untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun peran-peran tersebut antara lain, (Vany et al., 2022).

1) Peran sebagai fasilitator.

Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator adalah untuk membangun dan mengembangkan desa dengan cara menyediakan sarana, prasarana, dan dukungan yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu juga, pemerintah desa bertugas untuk memfasilitasi komunikasi dan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak lainnya, termasuk lembaga swadaya masyarakat atau sektor swasta.

2) Peran sebagai regulator.

Pemerintah desa sebagai regulator memiliki peran penting dalam mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu juga pemerintah desa sebagai regulator, pemerintah desa bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, aturan, dan peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan desa, mulai dari administrasi pemerintahan hingga kegiatan sosial dan ekonomi.

3) Peran sebagai motivator.

Pemerintah desa sebagai motivator berperan penting dalam menginspirasi, mendorong, dan membangkitkan semangat masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan desa dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sebagai motivator, pemerintah desa bertugas untuk memberikan dorongan positif, memberikan contoh yang baik, dan menciptakan kondisi yang

mendukung agar masyarakat lebih bersemangat dan termotivasi dalam berpartisipasi aktif.

4) Peran sebagai organisator.

Pemerintah desa sebagai organisator berperan dalam mengorganisir berbagai kegiatan, program, dan kegiatan pembangunan di tingkat desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Sebagai organisator, pemerintah desa bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat desa serta berbagai pihak terkait, baik dari pemerintahan maupun masyarakat itu sendiri, (Ariska Sari & Priyanti, 2022)

5) dan peran sebagai inovator.

Pemerintah desa sebagai inovator memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong kemajuan dan pembaharuan di desa, baik dalam aspek tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur, sosial, ekonomi, dan budaya. Sebagai inovator, pemerintah desa bertugas untuk memperkenalkan ide-ide baru, teknologi, metode, atau solusi yang lebih efisien untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

3. Dominasi

Dominasi pemerintah daerah dalam pengembangan sektor pariwisata dapat dilihat melalui lensa teori dominasi, yang menjelaskan

bagaimana aktor negara dalam hal ini pemerintah daerah mengendalikan arah pembangunan dengan mengatur, membatasi, atau bahkan menundukkan partisipasi masyarakat serta pelaku swasta.

Teori dominasi (hegemoni) yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci memberikan lensa kritis dalam memahami praktik dominasi pemerintah daerah dalam pengembangan sektor pariwisata. Menurut Gramsci, hegemoni adalah bentuk dominasi yang tidak selalu bersifat koersif, melainkan berlangsung melalui mekanisme persetujuan yang dibentuk secara kultural, ideologis, dan struktural. Dalam konteks ini, pemerintah daerah membangun kekuasaan bukan hanya melalui kontrol formal seperti regulasi dan kebijakan, tetapi juga melalui pembentukan cara berpikir dan pola partisipasi masyarakat yang dikondisikan agar sejalan dengan kepentingan negara (Rahma et al., 2024).

Dalam praktik pengembangan wisata, pemerintah daerah kerap mereproduksi narasi bahwa partisipasi masyarakat sudah terjadi, padahal dalam kenyataannya, masyarakat lokal hanya terlibat pada tahap-tahap pelaksanaan, bukan pada ranah strategis. Hegemoni tercipta saat masyarakat menerima situasi tersebut sebagai hal yang “wajar” atau “ideal”, meskipun sebenarnya mereka tidak memiliki kuasa penuh untuk menentukan arah pembangunan pariwisata di wilayahnya sendiri.

Pariwisata dapat merestrukturisasi kekuasaan di daerah tujuan wisata. Pemerintah berperan sebagai aktor kunci yang, bersama pasar dan masyarakat, menentukan siapa mendapat keuntungan. Dominasi

muncul sebagai hasil konflik nilai dan kepentingan antaraktor, dikemukakan oleh narasi kebijakan dan kolonisasi ideologis tentang ‘kemajuan’ (Oka Prasiasa, 2022).

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa pemerintah daerah sering menjadi aktor dominan dalam pengembangan wisata. Lewat perspektif Gramsci, dominasi itu tidak hanya soal kontrol fisik atau administratif, tapi lebih halus: melalui penciptaan narasi moral, kolaborasi dengan elite lokal, penggunaan simbol-simbol kekuasaan, dan yang kemudian, pembentukan kesadaran publik yang akhirnya menerima kondisi dominan tersebut sebagai “normal”. Oleh sebab itu, tentu dapat menimbulkan risiko bahwa masyarakat lokal yang seharusnya menjadi subjek utama pembangunan wisata justru menjadi objek kebijakan. Mereka tidak cukup diberdayakan untuk ikut membuat kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dalam jangka panjang, ini bisa menciptakan ketimpangan akses manfaat dan melemahnya kearifan lokal.

4. Pengembangan Pariwisata

a. Pariwisata

Pengertian pariwisata Menurut Soekadijo (dalam Sentrisen Takome & sahabatnya, 2021), menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Kepariwisata adalah

sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pariwisata. Sedangkan pengertian pariwisata Menurut Wahab (2008), menjelaskan bahwa, Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Dengan demikian Pariwisata adalah kegiatan perjalanan atau kunjungan ke suatu tempat yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan tujuan untuk menikmati keindahan alam, budaya, atau aspek lain yang dimiliki oleh suatu daerah perdesaan atau perkotaan, serta untuk rekreasi, pendidikan, atau bisnis.

b. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata menurut Yoeti (dalam Fitri Darmatasia & sahabatnya, 2020), menjelaskan bahwa, kegiatan pariwisata adalah salah satu ungkapan budaya. Mungkin tidak semua kebudayaan mempunyai konsep yang sama mengenai kegiatan berwisata. Bahkan mungkin ada yang sama sekali tidak mengenalnya. Pariwisata sebagai sebuah upaya yang sengaja, yang bertujuan untuk mendapatkan suatu pengalaman khusus ditempat lain diluar kawasan hunian si ‘wisatawan’, untuk kemudian kembali pulang, dan ini diatur dalam suatu industri jasa. Lanjutan pengembangan pariwisata menurut, Pitana (2009), menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata memerlukan teknik perencanaan

yang baik dan tepat. Teknik pengembangan itu harus menggabungkan beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran), karakteristik infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan/kompatibilitas dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal, dan seterusnya.

Hal tersebut berdasarkan pemahaman diatas bisa disimpulkan bahwa, Pengembangan pariwisata adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pemanfaatan sumber daya pariwisata yang ada di suatu daerah atau negara untuk meningkatkan daya tarik wisata serta menciptakan dampak positif bagi ekonomi negara, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu dalam Pengembangan pariwisata mencakup beberapa aspek yang penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pelestarian wisata, yakni:

1. Pemetaan potensi wisata untuk memahami kekuatan dan keunikan yang dimiliki oleh suatu destinasi, serta untuk merencanakan strategi pengembangan yang tepat.
2. Infrastruktur dan fasilitas. Infrastruktur dan fasilitas merupakan komponen kunci dalam pengembangan pariwisata karena keduanya mendukung kenyamanan dan kelancaran pengalaman wisatawan. Tanpa infrastruktur dan fasilitas yang memadai, sebuah destinasi wisata, meskipun memiliki potensi alam atau

budaya yang luar biasa, akan sulit menarik dan mempertahankan wisatawan.

3. Promosi dan pemasaran. untuk mengenalkan dan menarik minat wisatawan terhadap suatu destinasi atau produk wisata. Tanpa promosi dan pemasaran yang efektif, meskipun sebuah destinasi memiliki potensi yang luar biasa, bisa jadi akan kesulitan untuk dikenal dan dikunjungi oleh wisatawan
4. Pemberdayaan masyarakat lokal. untuk melibatkan masyarakat setempat secara aktif dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata di daerah mereka. Ini bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat setempat, serta memastikan bahwa mereka dapat berperan dalam menentukan arah perkembangan pariwisata.
5. Pengelolaan sumber daya alam dan budaya. untuk memastikan bahwa potensi alam dan budaya yang dimiliki oleh suatu daerah dapat dimanfaatkan secara optimal, tetapi tetap terjaga kelestariannya. Selain itu juga untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan sektor pariwisata dengan pelestarian alam dan budaya, sehingga keduanya bisa memberikan manfaat jangka panjang baik bagi masyarakat lokal, wisatawan, maupun lingkungan.
6. Keberlanjutan untuk memastikan bahwasannya kegiatan pariwisata dapat berlangsung dalam jangka panjang tanpa

merusak lingkungan, ekonomi, atau sosial. Selain itu juga untuk memastikan bahwasannya sektor pariwisata memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri pariwisata dan pelestarian sumber daya alam dan budaya.

Dari enam (6) aspek di atas merupakan bentuk dimana pemetaan potensi wisata sangat penting untuk menciptakan rencana pengembangan pariwisata yang lebih terstruktur, efisien, dan berkelanjutan, serta memaksimalkan potensi daerah agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal dan wisatawan.

H. Metode Penelitian

Penelitian didefinisikan sebagai suatu proses atau cara yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah. Metode penelitian adalah metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017:2) metode adalah cara bertindak dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah mencapai hasil yang optimal. penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni menjabarkan secara rinci dan berkualitas, dimana peneliti akan memberikan gambaran mengenai objek yang diamati atau fokus penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif, metode penelitian dengan metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena, peristiwa, atau keadaan yang sedang diteliti.

a. Objek penelitian

Objek penelitian adalah topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. objek penelitian ini antara lain adalah Dominasi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan wisata Goa Selarong di Kalurahan Guwosari.

b. Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi mengenai permasalahan penelitian yang akan dilakukan. Sugiono dalam Pastowo (2012:195) secara lebih spesifik, subjek penelitian adalah informan. Informan adalah orang pada latar penelitian. informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian. pemilihan yang menjadi sampel pada penelitian, yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik purposive sampling. dengan teknik purposive sampling adalah metode sampling dimana peneliti memilih sampel berdasarkan

pengetahuan penelitian tentang sampel yang akan dipilih. berikut ini tabel data nama informan yaitu.

Tabel 1.1 Data Nama Informan

No	Nama	Umur	Jabatan/Pekerjaan
1	Nur Hidayad	35 Tahun	Carik
2	Mursidi	57 Tahun	Pengelola wisata Goa Selarong
3	Suradi	56 Tahun	Pengelola Wisata Goa Selarong
4	Rusdi	38 Tahun	Masyarakat
5	Ibu ituk	45 Tahun	Masyarakat
6	Ibu Suarni	56 Tahun	Anggota POKDARWIS
7	Tri Sugianti	53 Tahun	Anggota POKDARWIS
8	Muhaimin	43 Tahun	Ketua BAMUSKal

Sumber: Wawancara informan di Kalurahan Guwosari

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Husaini (2012), menjelaskan bahwa Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. kegiatan ini dilakukan secara langsung pada objek penelitian. artinya observasi dilakukan peneliti ini ialah observasi yang akan mengantar peneliti dalam memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial dan mengetahui objek

penelitian dimana akan mempermudah peneliti untuk mengetahui secara pasti apa yang diteliti. Dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi di Kalurahan Guwosari dan Wawancara terhadap Dominasi Pemerintah Daerah dan Pengembangan Wisata Goa Selarong yang berkaitan dengan Pengembangan Wisata di Kalurahan Guwosari.

b. Wawancara

Menurut Esterbag (Sugiyono,2008), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu. dari hal tersebut tujuan dari wawancara adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. dalam wawancara peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan secara rinci dan dibantu dengan menggunakan alat perekam suara sehingga dapat memperoleh data dengan valid.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi yang konkret Mengenai Dominasi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Wisata Goa Selarong Di Kalurahan Guwosari

c. Dokumentasi

Dalam bukunya, sugiyono (2008:240) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. dokumentasi

biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang dalam dokumentasi.

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang di dapat oleh peneliti adalah Profil kalurahan Guwosari dan foto narasumber yang diwawancara di Kalurahan Guwosari.

3. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:246) Analisis data meliputi:

a. Pengumpulan data.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Ketiga metode ini digunakan secara terpadu untuk menggali pemahaman menyeluruh terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti. Peneliti menjelajahi konteks penelitian secara luas melalui apa yang mereka lihat, dengar, wawancarai, rekam, maupun dokumentasikan dalam bentuk foto.

b. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokus pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Reduksi data juga, merupakan proses untuk menyaring informasi, menyoroti poin-poin utama, serta memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang paling relevan melalui penyederhanaan data. Pada tahap ini, peneliti secara cermat memilih dan memilah data yang dianggap berkaitan erat dengan fokus pembahasan dalam skripsi. Proses ini mencakup penelaahan secara mendalam terhadap hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan di lapangan. Data yang dipertahankan adalah data yang benar-benar mendukung arah dan tujuan utama penelitian. Melalui proses reduksi ini, hasil penelitian diharapkan dapat disajikan secara lebih jelas, terstruktur, dan menyeluruh.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan sebagai kumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya pengambilan tindakan. Analisis data dengan cara ini mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, sehingga bisa merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Penyajian data dilakukan berdasarkan hasil dari proses reduksi, yang kemudian dituangkan dalam bentuk narasi tertulis secara singkat, terstruktur, dan mudah dipahami. Pada tahap ini, peneliti menyampaikan dinamika yang ditemukan di lapangan melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Penyusunan data dilakukan dengan

memilah data mentah secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Setelah dilakukan penyaringan, informasi disajikan dalam bentuk deskripsi naratif yang tersusun dalam paragraf yang sistematis, tabel untuk memudahkan perbandingan antar data, diagram atau bagan untuk menunjukkan pola atau hubungan antar unsur, serta visualisasi berupa gambar guna memperjelas pemahaman terhadap temuan yang diperoleh selama penelitian.

d. Penarikan kesimpulan

Konklusi diperoleh melalui tahapan analisis data yang telah dilaksanakan secara sistematis. Pada tahap ini, peneliti merumuskan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara umum, penarikan konklusi merupakan langkah akhir dari proses analisis data, di mana berbagai temuan dari hasil pengumpulan data dikaji secara menyeluruh. Proses ini melibatkan penelaahan mendalam terhadap fenomena empiris yang ditemukan di lapangan serta pengembangan kerangka teori yang relevan berdasarkan data yang telah dihimpun. Dalam hal ini, peneliti menarik konklusi berdasarkan data yang disajikan terkait, Dominasi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Wisata Goa Selarong. Di samping itu, proses penarikan kesimpulan dimaksudkan untuk merespons pertanyaan penelitian serta menyajikan pemahaman yang mendalam dan bermakna bagi pembaca.

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARI

A. Sejarah Kalurahan Guwosari

Kondisi desa adalah salah satu wilayah yang harus diperhatikan karena desa memberikan gambaran tentang sejarah desa, demografi, kondisi sosial, serta perekonomian. Kalurahan guwosari memiliki luas wilayah 830,01 hektar dan berbatasan dengan lima (5) kalurahan yakni sebagai berikut:

1. Kalurahan Bangunjiwo
2. Kalurahan Wijirejo
3. Kalurahan Sendangsari
4. Kalurahan Bantul
5. Dan Kalurahan Ringinharjo.

Desa Guwosari dibentuk dari gabungan dua desa, yakni Selarong dan Iroyudan berdasarkan perintah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada Bulan Oktober 1947. Nama Guwosari dipilih sebagai jalan tengah agar bisa diterima seluruh masyarakat tanpa menghilangkan icon Wilayah yakni Gua Selarong atau Gua Secang. Nama Selarong berasal dari nama Pangeran Aryo Selarong, putra Prabu Hanyokrowati atau Pangeran Sedo Krapyak, raja kedua Kesultanan Mataram dari Istri Permaisuri I (Kulon), Ratu Tulung Ayu. Belum diketahui pasti nama mudanya apakah RM. Wuryah ataukah RM. Chakra, karena keduanya memakai nama gelar yang sama yakni Pangeran Aryo Selarong. Usai Perang Jawa (1830), Kasultanan Yogyakarta melakukan penataan administrasi, diantaranya dengan membentuk Kabupaten Bantul dan

pembagian wilayah-wilayah di dalamnya. Dimungkinkan saat inilah Selarong dan Iroyudan dibentuk menjadi desa dengan dipimpin seorang demang. Untuk Selarong, diangkatlah Raden Joyosentono menjadi demang dan kemudian dilanjutkan anak keturunannya: Demang Atmorejo, Demang Atmosentono, dan Demang Kertosentono.

Masyarakat dan Penguasa Selarong saat itu, yakni Kenthol Ongkojoyo, yang merupakan pendukung utama Pangeran Diponegoro menerima kebijakan penataan administrasi tersebut karena meyakini bahwa Pangeran Diponegoro suatu saat akan kembali ke Yogyakarta dan mendirikan Kerajaan tersendiri dengan wilayah kekuasaan meliputi sebelah timur Kali Progo dan sebelah barat Kali Opak, berpusat di Selarong. Bahkan peran kenthol ongkojoyo dalam membidani lahirnya Kabupaten Bantul sangatlah besar. Keyakinan Masyarakat dan Penguasa Selarong tersebut karena Pangeran Diponegoro statusnya belumlah menjadi tahanan negara. Beliau dinyatakan ditahan baru tahun 1839. Status Kademangan berakhir pada tahun 1914 di mana Kasultanan Yogyakarta kembali melakukan penataan administrasi dan penguasaan atas tanah. Membentuk Desa atau Kalurahan, membagi tanah kepada rakyat, merubah bentuk penarikan pajak dari pajak natura atau bagi hasil menjadi pajak uang. Saat itulah lahirnya Desa atau Kalurahan Selarong dengan pusat pemerintahan di bekas rumah Raden Joyosentono, di Pedukuhan Gandekan, dengan wilayah meliputi Pedukuhan Gandekan, Dukuh, Kentholan Kidul, Kentholan Lor, Kembangputihan, Pringgading, Bungsing, dan Watu Gedug.

Selanjutnya, pada tahun 1947 Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan perintah penggabungan desa-desa di wilayah Kasultanan Yogyakarta. Oktober 1947 Desa Selarong bergabung dengan Desa Iroyudan dengan nama baru Guwosari dengan lurah pertama tahun 1946 -1961 yaitu Sukrowardi. Tahun 1961 jabatan lurah digantikan oleh Ngumar sampai tahun 1988. Tahun 1988 -1992 lurah dijabat oleh Budiman sebagai Pejabat Sementara. Tahun 1992 dilaksanakan pemilihan lurah untuk pertama kalinya dan terpilih sebagai lurah M. Daim Raharjo sampai tahun 1995.

Kalurahan Guwosari senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek, yakni aspek pemerintahan, pendudukan, budaya, serta ekonomi. Hal tersebut dari geografis, aspek-aspek tersebut sangat signifikan dan menyumbangkan dampak positif yang layak dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, Kalurahan Guwosari sangat berpotensi besar untuk berkembang maju sehingga dapat menjadikan wilayah Kalurahan Guwosari salah satu titik sentral dalam berbagai aktivitas yang produktif dan tentu menjadi kemudahan Kalurahan Guwosari dalam berbagai pekerjaan karena terletak di zona transisi sosial antara perkotaan dan perdesaan.

Tabel di bawah ini lebih jelasnya tentang perjalanan sejarah kepemimpinan kalurahan guwosari sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kepemimpinan Lurah Guwosari

No	Nama lurah	Tahun/periode	Keterangan
1	Sukrawardi	1945-1961	Kembang putihan
2	Ngumar	1961- 1988	Kembang putihan
3	Budiman	1988 -1992	Pejabat sementara
4	M. Daim Raharjo	1992 - 1995	Karangber
5	Zainuri	1995-1997	Kembang Putih
6	M.Zainuri	1997-2000	Iroyudan
7	Drs.Abani	2000-2002	Kalakijo
8	Abdul Basyir, S.Ag	2002-2012	Santan
9	M.Muh Suharto	2012-2018	Iroyudan
10	Masduki Rahmad, S. IP	2018-2024	Oyudan

Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2025

Terbentuknya wilayah Kalurahan Guwosari dari masa-kemasa dan sampai saat ini yang mendominasi memegang kepala desa adalah mayoritas laki-laki. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa peran Perempuan dalam memimpin suatu wilayah sangat minim dan bisa diartikan bahwa kepercayaan Perempuan untuk menyakinkan menjadi seorang pemimpin sangat di sayangkan kurang. Pada hal kalau kita lihat dari Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia keterlibatan Perempuan sangat berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan mengusir penjajah dari tanah indonesia. Dengan demikian Perempuan bisa memimpin wilayah, melayani kepentingan masyarakat,

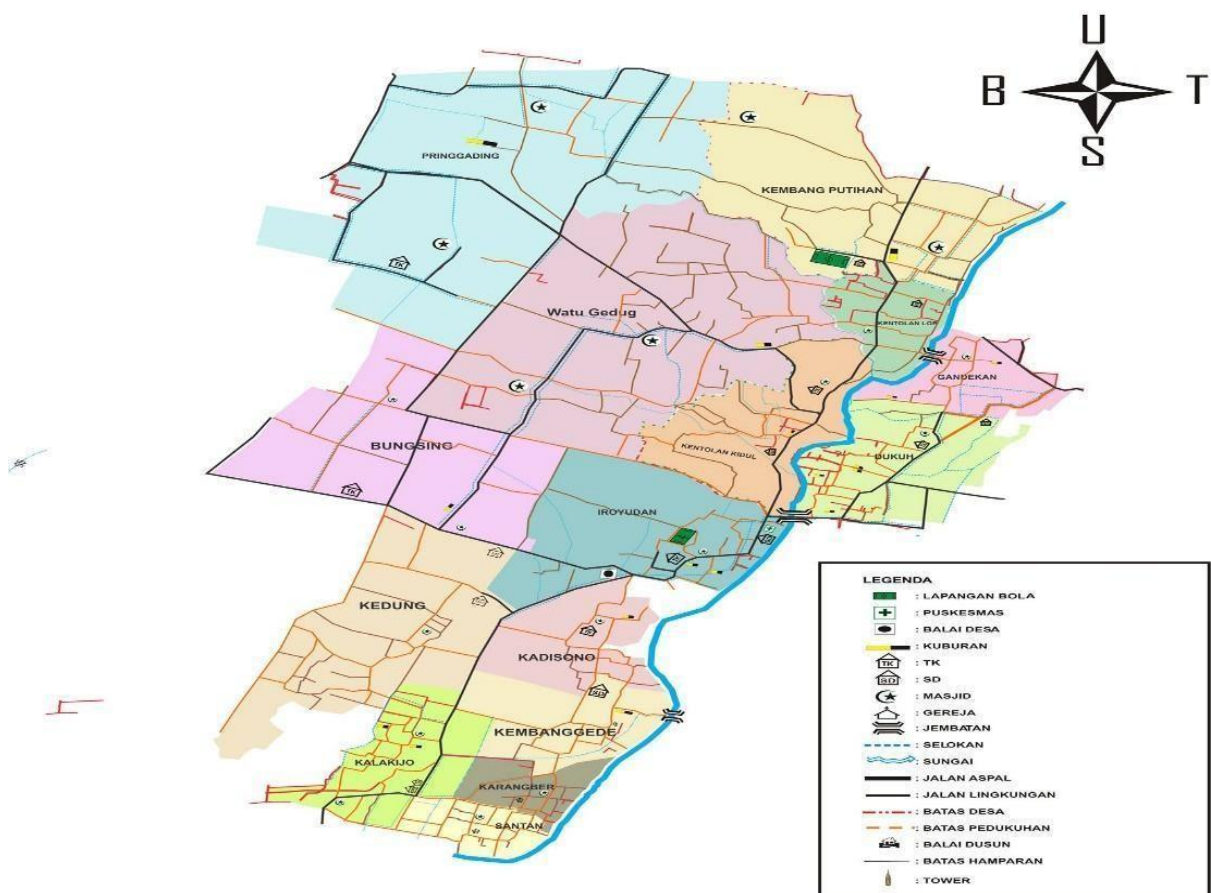
mensejahterakan rakyat, dan membangun jiwa nasionalisme dengan berlandaskan kesetaraan.

B. Kondisi geografis desa

1. Peta wilayah Kalurahan Guwosari

Peta wilayah merupakan suatu penunjuk arah dan tujuan atau peta secara spesifiknya menampilkan gambaran permukaan bumi yang dapat dijangkau secara langsung maupun tidak langsung yang menggambarkan sebagian bentuk-bentuk permukaan bumi yang bersifat alami.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kalurahan Guwosari
PETA DESA GUWOSARI



Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2025

Kalurahan Guwosari memiliki luas wilayah sekitar 830.01 Ha, dengan total Penduduk kurang lebih 14.107 jiwa yang terdiri dari 3.879 Kepala Keluarga. Secara administrasi pemerintahan Kalurahan Guwosari memiliki padukuhan yang terbagi menjadi lima belas (15) yakni diantaranya: Kembang Putih, Kentolan Lor, Kentolan Kidul, Gandekan, Dukuh, Iroyudan, Kadisono, Kembanggede, Karangber, Santan, Kalakijo, Kedung, Bungsing, Watugedug, Pringgading.

Hal tersebut berdasarkan peta wilayah Kalurahan Guwosari diatas cukup luas. Kemudian setiap wilayah yang berada di kalurahan guwosari memiliki potensi yang cukup mumpuni, tentu jika diperhatikan dan dikelola dengan baik maka dapat menjadi penopang dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Guwosari.

2. Batas wilayah

Kalurahan Guwosari yang terletak di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul memiliki batas wilayah dan luas Kalurahan Guwosari dengan posisi lahan 830,01 Hektar, dengan batas kaluarahan.

Sebelah Utara : Kalurahan Bagujiwo Kapanewon Kasihan

Sebelah Selatan : Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak

Sebelah Barat : Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan

Sebelah Timur : Kalurahan Bantul dan Ringinharjo Kapanewon

Bantul Diketahui bahwa jarak 3,00 Km menuju Kapanewon Pajangan dan 2,50 Km jarak dari pusat pemerintahan kabupaten.

C. Kondisi Demografis

Demografi merupakan mengacu pada cabang ilmu pengetahuan yang kemudian membahas soal jumlah, distribusi, dan komposisi populasi manusia. Pada perubahan dan penyebab dari dampak biasanya berakibat oleh kelahiran, bertambahnya jumlah penduduk, dan mobilitas sosial. Dengan demikian berikut ini jumlah penduduk Desa Guwosari. Jumlah penduduk Desa Guwosari adalah 14.107 jiwa, yang terdiri dari 7.078 jiwa laki-laki dan 7.029 jiwa perempuan.

1. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 2.2 Penduduk Berdasarkan Gender

No	Jenis kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Laki-laki	7.078	0	7.078
2	Perempuan	0	7.029	7.029
Total		7.078	7.029	14.107

Sumber: Data Monografi Kalurahan Guwosari Tahun 2025

Berdasarkan tabel dengan data yang tersedia di atas jumlah penduduk di Kalurahan Guwosari menunjukkan bahwa laki-laki dan Perempuan perbandingan penduduk jenis kelamin hampir sama. Hal ini dilihat dari jumlah laki-laki yakni dengan total tercatat sebanyak 7.078 jiwa penduduk, sedangkan Perempuan tercatat sebanyak total 7.029 jiwa penduduk. Perselisihan sedikit relatif kecil ini merupakan mencerminkan distribusi demografis hampir sama antara jumlah kedua jenis kelamin tersebut.

Keseimbangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin ini menjadi penting ketika dikaji dalam konteks distribusi kekuasaan politik berbasis gender. Dalam masyarakat yang demokratis dan inklusif, kesetaraan jumlah ini seharusnya menjadi potensi untuk mendorong partisipasi politik yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan representasi sering kali bukan disebabkan oleh jumlah penduduk yang tidak seimbang, melainkan oleh norma sosial, budaya patriarki, serta akses yang tidak merata terhadap ruang-ruang pengambilan keputusan.

Dengan demikian, data demografis ini bisa menjadi dasar awal bagi para peneliti, pengambil kebijakan, maupun aktivis gender untuk mendorong perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap prinsip kesetaraan. Penduduk yang seimbang secara kuantitas membuka peluang untuk membangun struktur politik yang lebih representatif dan inklusif di tingkat lokal.

2. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Tabel 2.3 Mata Pencaharian Penduduk

No	Kelompok	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Belum/Tidak Bekerja	2.602	1322	1280
2	Mengurus Rumah Tangga	1.361	204	1157
3	Pelajar/Mahasiswa	2.328	1152	1176
4	Pensiunan	147	100	47
5	Pegawai Negeri Sipil (Pns)	293	169	124
6	Tentara Nasional Indonesia (Tni)	26	22	4
7	Kepolisian Ri (Polri)	53	44	9

8	Perdagangan	74	37	37
9	Petani/Pekebun	477	220	257
10	Peternak	14	11	3
11	Nelayan/Perikanan	4	2	2
12	Industri	2	1	1
14	Transportasi	5	4	1
15	Karyawan Swasta	1.323	780	543
16	Karyawan Bumh	12	11	1
17	Karyawan Bumd	9	6	3
18	Karyawan Honorer	23	17	6
19	Buruh Harian Lepas	3.227	1856	1371
20	Buruh Tani/Perkebunan	477	253	224
21	Buruh Nelayan/Perikanan	1	0	1
22	Buruh Peternakan	3	3	0
23	Pembantu Rumah Tangga	36	15	21
26	Tukang Batu	82	36	46
27	Tukang Kayu	27	17	10
29	Tukang Las/Pandai Besi	1	1	0
30	Tukang Jahit	9	1	8
32	Penata Rias	1	0	1
35	Mekanik	11	6	5
36	Seniman	10	7	3
37	Tabib	4	0	4
38	Paraji	21	12	9
42	Pendeta	1	1	0
44	Wartawan	1	1	0
64	Dosen	11	6	5
65	Guru	102	36	66
67	Pengacara	3	3	0
71	Konsultan	1	1	0

72	Dokter	4	3	1
73	Bidan	8	1	7
74	Perawat	24	5	19
75	Apoteker	1	0	1
79	Pelaut	1	1	0
80	Peneliti	2	2	0
81	Sopir	11	11	0
84	Pedagang	30	9	21
85	Perangkat Desa	24	20	4
86	Kepala Desa	1	1	0
88	Wiraswasta	1.178	652	526
89	Lainnya	29	11	18
	Jumlah	14.095	7073	7022
	Belum Mengisi	12	5	7
	Total	14107	7078	7029

Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2025

Dari tabel di atas, data penduduk berdasarkan mata pencaharian menunjukkan bahwa buruh harian lepas lebih mendominasi dengan jumlah terbanyak sekitar 3.227 penduduk, diikuti oleh Karyawan Perusahaan Swasta dengan jumlah sekitar 1.323 penduduk dan sektor wiraswasta dengan jumlah pekerja yang cukup banyak sekitar 1.178 penduduk, beserta diikuti beberapa lainnya di kalurahan guwosari. Dominasi sektor ini mencerminkan dinamika sosial-ekonomi masyarakat yang ditopang oleh pekerjaan di luar sektor formal pemerintahan.

Dengan demikian temuan ini sangat penting untuk dijadikan acuan dasar dalam pembacaan struktur kelas sosial masyarakat. Dengan beragamnya jenis pekerjaan, mulai dari buruh hingga pekerja informal

lainnya, mengindikasikan adanya kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah yang rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja. Hal dengan situasi ini menunjukkan bahwa diperlukan mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak dan berkeadilan sosial. Pemerintah desa dan stakeholder lainnya diperlukan kerjasama dengan melahirkan kebijakan yang strategis dalam Pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Pada dasarnya Fokus kebijakan hendaknya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi hasil pembangunan yang merata. Hal ini penting agar setiap warga, terlepas dari jenis pekerjaan dan latar belakang sosialnya, memiliki kesempatan yang setara untuk hidup layak dan berkembang.

3. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

Tabel 2.4 Penduduk berdasarkan agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	13.449
2	Kristen	212
3	Katolik	335
4	Budha	5
5	Hindu	2
6	Konghucu	3
7	Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya	1
8	Belum Mengisi	100
	Jumlah total	14.107

Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2025

Berdasarkan dari tabel di dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang menganut agama di kalurahan guwosari, mayoritas agama islam dengan

jumlah 13.449 orang, di ikuti oleh agama katolik sekitar 335 orang dan Kristen protestan sekitar 212 orang dan beserta diikuti beberapa agama lainnya. Selanjutnya bahwa organisasi keagamaan yang paling besar yang berada di kalurahan guwosari merupakan mayoritas islam.

4. Jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.5 Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum masuk TK	656
2	Sedang TK/play group	452
3	Sedang sekolah	1.733
4	Tidak tamat SD	1.422
5	Tamat SD/ sederajat	1.818
6	Tidak tamat SLTP	3.157
7	Tamat SLTA	528
8	Tamat SMP/ sederajat	315
9	Tamat SMA/ sederajat	3.487
10	Tamat D-1/ sederajat	237
11	Tamat D-3/ sederajat	104
12	Tamat S-1/ sederajat	181
13	Tamat S-2/ sederajat	17
Jumlah total		14.107

Sumber: Profil Kaurahan Guwosari 2025

Dari tabel diatas berdasarkan jumlah Tingkat Pendidikan di kalurahan guwosari menunjukan bahwa Tingkat Pendidikan SMA yang merupakan sebagai Tingkat Pendidikan tinggi dapat memberikan suatu sumber pengetahuan kepada individunya.

Oleh karena itu perlu diingat bahwa dengan data ini menunjukan bahwa

Tingkat Pendidikan mayoritas penduduk dan masih ada sebagian penduduk dengan tingkat pendidikan yang beragam, seperti pendidikan dasar (SD), pendidikan menengah pertama (SMP), atau pendidikan tinggi. Hal ini data dapat menginterpretasikan, penting dipertimbangkan variasi tingkat pendidikan yang ada di kalurahan dan melihat secara holistik kondisi pendidikan di wilayah tersebut. Pemerintah desa dengan masyarakat setempat tetap perlu di pertimbangkan untuk melihat dan memastikan kesetaraan dalam mengakses pendidikan agar supaya dapat mendorong kualitas manusia melalui pendidikan untuk persiapan pembangunan berkelanjutan di kalurahan guwosari.

5. Jumlah Penduduk berdasarkan Angkatan Kerja

Tabel 2.6 Kualitas Penduduk Angkatan Kerja

No	Penduduk Angkatan kerja	Laki-laki	Perempuan
1	Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD	1.302	1.088
2	Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SD	1.201	1.151
3	Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTP	1.168	1.039
4	Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTA	1.470	1.017
5	Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat perguruan Tinggi	191	227
6	Penduduk tingkat ketergantungan	2.322	1.931
	Jumlah Total	7.654	6.453
		14.107	

Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2025

Dari data tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas tenaga kerja di Kalurahan Guwosari memiliki tingkat pendidikan SLTA. Penduduk

usia 18-56 tahun dengan tingkat pendidikan SLTA merupakan kelompok yang paling dominan dalam kualitas tenaga kerja di kalurahan tersebut. Kemudian, data juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang tamat perguruan tinggi lebih sedikit dibandingkan dengan tingkat pendidikan SLTA, seperti perguruan tinggi, masih menjadi kelompok yang paling sedikit dalam komposisi tenaga kerja di kalurahan tersebut. Namun disisi lain data menunjukkan bahwa masih banyaknya tingkat ketergantungan penduduk yang mendominasi.

6. Jumlah penduduk berdasarkan cacat mental dan fisik

Tabel 2.7 Data Penduduk Cacat Mental dan Fisik

No	Jenis cacat	Laki-laki	Perempuan
1	Tuna Wicara	1	1
2	Tuna Netra	2	3
3	Sumbing	1	0
4	Cacat Fisik/tuna daksa lainnya	9	5
5	Idiot	5	5
6	Gila	9	6
7	Stres	2	2
	Jumlah total	31	22

Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2025

Berdasarkan data diatas, dilihat bahwa di Kalurahan Guwosari terdapat sejumlah warga dengan kondisi cacat mental dan fisik. Jumlah warga dengan cacat fisik atau tuna daksa tercatat sebagai yang paling banyak dibandingkan dengan jenis cacat lainnya. Cacat fisik dapat mencakup berbagai kondisi seperti kehilangan anggota tubuh, kelainan

bentuk tubuh, atau gangguan mobilitas. Kemudian jumlah cacat sumbing dan tuna wicara tercatat sebagai yang paling sedikit. Cacat sumbing dapat merujuk pada gangguan pendengaran, sedangkan cacat tuna wicara dapat merujuk pada gangguan kemampuan berbicara atau berkomunikasi secara lisan. Oleh karena itu, adanya warga cacat mental dan fisik di kalurahan guwosari menunjukan untuk menaruh perhatian, khusus pada kelompok masyarakat untuk memberikan dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam membantu meningkatkan kualitas hidup dan inklusi sosial bagi warga dengan kecacatan.

D. Kondisi Ekonomi Kalurahan Guwosari

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki kalurahan Guwosari menjadi potensi besar untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat maupun sosial dan budaya. Sebagai contoh, sektor pertanian di kalurahan ini dapat memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi penduduk yang berkecimpung dalam budidaya tanaman pangan, hortikultura, atau perikanan. Potensi perkebunan seperti perkebunan kelapa, kakao, atau kopi juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi kalurahan. Selain itu, sektor pariwisata juga memiliki peran penting dalam perekonomian kalurahan. Potensi wisata alam, wisata budaya, atau wisata sejarah yang ada di Kalurahan Guwosari dapat menarik kunjungan wisatawan, sehingga berdampak positif pada pendapatan masyarakat melalui sektor jasa dan perdagangan.

1. Potensi strategis

Kalurahan Guwosari merupakan wilayah Kalurahan yang terletak diantara empat Kapanewon yaitu; Kapanewon Pajangan, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Pandak dan Kapanewon Bantul. Kalurahan Guwosari memiliki potensi strategis, baik itu di potensi Pertanian, Peternakan, Pariwisata maupun Industri kecil dan juga Kuliner. Demikian juga, Kalurahan Guwosari memiliki sektor pariwisata yang menarik. Obyek wisata seperti cagar budaya, agrowisata, air terjun, dan Goa Selarong. Cagar budaya dan situs petilasan Pangeran Diponegoro menjadi daya tarik sejarah dan budaya yang dapat menarik wisatawan yang tertarik dengan warisan budaya Indonesia.

Potensi industri kecil dan kuliner juga dapat ditemukan di Kalurahan Guwosari. Industri kecil seperti kerajinan tangan atau industri rumah tangga dapat memberikan peluang usaha bagi masyarakat setempat. Sementara itu, kuliner khas Kalurahan Guwosari, seperti makanan tradisional atau olahan dari hasil pertanian lokal, dapat menjadi daya tarik kuliner bagi wisatawan yang ingin mencoba keunikan kuliner daerah. Dengan adanya potensi-potensi tersebut, Kalurahan Guwosari memiliki peluang yang baik untuk mengembangkan sektor ekonomi yang beragam. Pengembangan pertanian, peternakan, pariwisata, industri kecil, dan kuliner. Potensi-potensi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengurangi tingkat pengangguran, dan mendorong pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan di kalurahan tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka memaksimalkan potensi ini, penting bagi pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat setempat untuk membangun kemitraan dalam pengembangan infrastruktur, promosi pariwisata, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses pasar. Dengan upaya bersama, Kalurahan Guwosari dapat menjadi daerah yang berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakatnya, (sumber: profil kalurahan guwosari 2025)

2. Mata pencaharian Penduduk Kalurahan Guwosari

Berdasarkan mengenai data diatas mata pencaharian penduduk kalurahan guwosari memberikan gambaran penting untuk menentukan kebijakan pembangunan yang tepat. Jenis pekerjaan atau mata pencaharian warga guwosari memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari data terlihat beragamnya jenis pekerjaan penduduk Guwosari, baik yang berprofesi seperti PNS, TNI, POLRI, dokter, karyawan swasta, wiraswasta atau pedagang, petani, buruh, pensiunan, jasa, dan lain-lain. Keanekaragaman mata pencaharian ini menunjukkan adanya berbagai sektor ekonomi yang menjadi sumber penghidupan penduduk. Profesi sebagai PNS, TNI, dan POLRI menunjukkan keberadaan sektor pelayanan publik dan keamanan dalam stabilitas dan pemerintahan di Kalurahan Guwosari. Adanya dokter dan tenaga kesehatan menandakan adanya akses pelayanan kesehatan yang memadai bagi penduduk. Sedangkan wiraswasta atau pedagang

menunjukkan adanya kegiatan perdagangan dan usaha mikro di kalurahan tersebut. Petani dan buruh menggambarkan adanya sektor pertanian dan industri yang memberikan lapangan kerja dan kontribusi dalam produksi pangan dan barang. Demikian juga dengan pensiunan yang menunjukkan adanya kebijakan pemerintah dalam menjaga kesejahteraan para pensiunan. Kemudian, adanya profesi jasa menunjukkan adanya sektor layanan yang berkembang di kalurahan tersebut. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu diperhatikan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang potensial, seperti pemberdayaan usaha mikro, pengembangan sektor pertanian, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan akses lapangan kerja. Hal ini penting adanya dukungan dan pelatihan ke masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan inovasi dalam menjalankan usaha dan memperhatikan diversitas mata pencaharian penduduk, untuk menghasilkan kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Pendapatan Kalurahan Guwosari

Pendapatan kalurahan Guwosari merupakan anggaran setiap tahun dan menjadi hak kalurahan. Anggaran kalurahan ini yang meliputi Pendapatan Asli kalurahan dan dana transfer. Berdasarkan Monografi kalurahan 2023 sumber-sumber pendapatan kalurahan terdiri dari:

- Pendapatan Asli Kalurahan Rp. 262.415.500.-
- Dana Desa (DD) Rp. 1. 509.579.000.-

- Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 1. 299. 377. 250.-
- Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Bantul Rp. 1. 605. 000.000.-
- Bantuan Keuangan Provinsi DIY Rp. 675. 000.000.-
- Pendapatan lain kaluarahan Rp. 23. 166. 902.-

Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2025

Dari data diatas, menunjukan pendapatan kalurahan Guwosari yang paling besar merupakan dari pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan diukur dari pendapatan asli kalurahan. Berdasarkan data diatas terlihat bahwa pendapatan kalurahan termasuk sangat cukup baik untuk mendukung pembangunan kaluarahan guwosari, meskipun beberapa sumber dana ini tidak banyak diakses oleh kalurahan. Tetapi sebagai upaya dalam mendukung program pembangunan kalurahan adalah membangun kemitraan pihak pemodal.

E. Sarana Prasarana Desa dan Budaya Kalurahan Guwosari

1. Sarana dan prasarana kesehatan

Sarana dan prasarana Kesehatan merupakan hal penting yang diperhatikan pemerintah untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat kalurahan guwosari. Sarana dan prasarana kesehatan sebagai pemenuhan suatu kebutuhan vital bagi masyarakat, terutama pada saat menghadapi situasi seperti adanya wabah Virus Covid-19. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kalurahan Guwosari adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Tenaga Kesehatan dan Balai Pengobatan

No	Tenaga kesehatan	Jumlah
1	Dokter	4
2	Apoteker	1
3	Perawat	24
4	Bidan	8
	Jumlah total	37

Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2025

Kehadiran tenaga kesehatan Kalurahan Guwosari membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat setempat. Masyarakat guwosari tidak lagi mengalami kesulitan dalam mencari pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan. Keberadaan tenaga kesehatan di kalurahan Guwosari memberikan manfaat yang sangat berarti dalam memenuhi hak kesehatan masyarakat. Mereka tidak hanya menyediakan pelayanan medis, tetapi juga memberikan edukasi tentang kesehatan dan pencegahan penyakit kepada masyarakat. Hal ini berpotensi mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit di kalangan masyarakat desa.

2. Sarana dan prasarana pendidikan

Tabel 2: 9 Sarana dan prasarana pendidikan

No	Sarana dan prasarana pendidikan	Jumlah unit
1	Gedung TK	10
2	Gedung SD	7
3	Gedung SMA	1
4	Perpustakaan kalurahan	1
5	Sarana dan prasarana pendidikan lainnya	17
Jumlah total		36

Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2025

Dari tabel yang disajikan, dilihat bahwa Kalurahan Guwosari telah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Dengan adanya fasilitas pendidikan yang memadai, masyarakat desa dapat dengan mudah mengakses layanan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka terima. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di Kalurahan Guwosari seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi para siswa. Selain itu, keberadaan fasilitas tersebut juga mendorong meningkatnya minat belajar dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Dengan adanya akses yang mudah ke fasilitas pendidikan yang lengkap, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi intelektual mereka. Fasilitas seperti laboratorium dan perpustakaan dapat membantu siswa dan masyarakat dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Hal ini dapat berdampak positif pada perkembangan pemikiran kritis, kreativitas, dan inovasi di kalangan masyarakat.

3. Sarana dan prasarana olahraga

Tabel 2: 10 Sarana dan prasarana olahraga Guwosari

No	Sarana dan prasarana olahraga	Jumlah unit
1	Lapangan bulu tangkis	17
2	Meja pimpong	15
3	Lapangan voli	15
4	Gelanggang remaja	2
5	Jumlah total	49

Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2025

Dari tabel yang disajikan, terlihat bahwa Kalurahan Guwosari sudah memiliki sarana olahraga yang cukup memadai. Fasilitas seperti lapangan olahraga, arena bermain, atau pusat kebugaran dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk berolahraga, menjaga kesehatan, dan meningkatkan kebugaran fisik mereka. Selain membantu meningkatkan kebugaran fisik, olahraga juga dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kualitas tidur, dan meningkatkan kecerdasan emosional. Dalam konteks pandemi, melakukan olahraga secara teratur juga dapat membantu dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh, yang sangat penting dalam melawan infeksi.

4. Budaya kalurahan guwosari.

Tabel 2: 11 Budaya kalurahan guwosari

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Masyarakat kalurahan guwosari melestarikan adat dan budaya sebagai warisan dari nenek moyang bangsa indonesia, khususnya dalam kebudayaan jawa kraton Yogyakarta.	Perilaku budaya Jawa Islam dengan tata krama yang sangat dijunjung tinggi, seperti adat bertamu, adat bertutur kata, adat berpakaian, adat bermusyawarah dan sebagainya.	Pelestarian nyadran, tirakatan, kenduri, sholawat barzanji, jathilan, sholawat versi jawa, gejog lesung dan lain-lain. Pelestarian acara Grebeg Selarong merupakan acara merti desa (bersih desa) yang dimaksudkan untuk perayaan panen sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Pelestarian bangunan kuno yang hingga saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat, yaitu rumah joglo.

Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2025

5. Lembaga kemasyarakatan kalurahan guwosari

Table 2: 12 Sarana dan Prasarana

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Guwosari

No	Lembaga Kemasyarakatan Kaluarahan	Jumlah Unit
1.	LKMD/LPM atau sebutan lain	
	Memiliki kantor sendiri	1
	Peralatan Kantor: Komputer, fax	1
	Mesin Tik	0
	Kardek	0
	Buku Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	0
	Jumlah meja dan kursi	0
	Buku Administrasi	0
	Jumlah Kegiatan	0
2.	PKK	
	Gedung/Kantor	1
	Peralatan Kantor/ATK/Inventaris	1
	Kepengurusan	1
	Buku Administrasi PKK	1
	Kegiatan	1
	Jumlah Kegiatan	3
3.	Karang Taruna	
	Kepengurusan	1
	Buku Administrasi	1
	Jumlah Kegiatan	5
4.	BUMkal	
	Memiliki Kantor/Gedung/Menumpang	1
	Kepengurusan	1
	Buku Administrasi	1
	Jumlah Kegiatan	5

Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2025

Dari tabel yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa kelembagaan di Kalurahan Guwosari telah mencapai tingkat yang cukup baik. Baik dari segi fasilitas administrasi maupun fasilitas lainnya, infrastruktur yang tersedia mendukung kelancaran berbagai kegiatan di tingkat kalurahan. Fasilitas administrasi seperti kantor desa, ruang rapat, dan tempat penyimpanan arsip. Demikian juga dengan fasilitas lainnya di Kalurahan Guwosari yang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat dapat menjalankan berbagai kegiatan, seperti pertemuan masyarakat atau kegiatan sosial lainnya dengan lebih baik dan terorganisir.

Meskipun sudah terdapat fasilitas yang cukup baik, tetap penting untuk terus melakukan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas yang ada, untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan fasilitas agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan dan kesejahteraan kalurahan secara keseluruhan.

F. Profil Pemerintah Kalurahan

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat tiga jenis lembaga desa yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di suatu desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Kemasyarakatan. Menurut undang-undang, penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat desa dilakukan oleh pemerintah desa dan lembaga permusyawaratan desa. Oleh karena itu, pemerintahan Desa bertugas

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara.

Pemerintah desa atau sebutan lain menyebut kepala desa/lurah dan pemerintahan kalurahan merupakan bagian dari pemerintahan kalurahan. Lurah bertugas mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Perangkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Pamong Kalurahan adalah Pembantu Kepala lurah yang meliputi Sekretaris Kalurahan, Pelaksana Teknis dan Pelaksana kewilayahan. Tugas sekretaris desa adalah membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan kalurahan yang dipimpin oleh Carik, terbagi menjadi 3 urusan yaitu; urusan keuangan, urusan perencanaan dan urusan tata usaha dan umum. Badan Pelaksana Teknis terdiri dari tiga seksi, yaitu seksi Pemerintah, seksi Kesejahteraan dan seksi pelayanan, dan tanggung jawab pelaksanaan mencakup kewilayahan 15 padukuhan di desa Guwosari.

Table 2: 13 Pemerintah Kalurahan Guwosari

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin
1	Masduki Rahmad S.IP	Kepala Desa (Lurah)	S1	Laki-laki
2	Nur Hidayad	Sekretaris (Carik)	Diploma Iv/ Strata I	Laki-laki
3	Muhammad Taufik	Jagabaya	SLTA / sederajat	Laki-laki
4	Umar Wanto	Ulu-Ulu	SLTA / Sederajat	Laki-laki

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin
5	Muh Nizar	Kamitua	Akademi/ Diploma III/S. Muda	Laki-Laki
6	Miftakhul Hasanah S.HUM	Pangripta	Diploma IV/ Strata I	Perempuan
7	Arif Subawanto, A.Md	Danarta	Akademi/ Diploma III/S. Muda	Laki-laki
8	Yudi Susanto	Tata Laksana	Diploma IV/ Strata I	Laki-laki
9	Jumari	Staff	SLTA / Sederajat	Laki-laki
10	Asnawi	Staff	SLTA / Sederajat	Laki-laki
11	Waziri	Staff Honorer	Akademi/ Diploma III/S. Muda	Laki-laki
12	Sriyatun	Staff	SLTA / Sederajat	Perempuan
13	Muhammad Didin Rusdan	Staff Honorer	SLTA / Sederajat	Laki-laki
14	Sanja Anggraini	Staff Honorer	SLTA / Sederajat	Perempuan
15	Faran Kurniawan	Staff Honorer	SLTA / Sederajat	Laki-laki
16	Dewi Iriani Rahmawati	Staff	Diploma IV/ Strata I	Perempuan
17	Novi Ermawati	Staff Honorer	Diploma IV/ Strata I	Perempuan
18	Yuni Uswantu Khasanah	Staff Honorer	Diploma IV/ Strata I	Perempuan
19	Uswantu Khasanah	Staff Honorer	Diploma IV/Strata I	Perempuan
20	Sulisman	Dukuh Kembangputihan	SLTA / Sederajat	Laki-laki
21	Ahmad Khalim	Dukuh Kentolan Lor	SLTA / Sederajat	Laki-laki
22	Muhammad	Dukuh Kentolan	SLTA / Sederajat	Laki-laki

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin
	Fatkhurrohman	Kidul		
23	Teguh Triyanto	Dukuh Gandekan	SLTA / Sederajat	Laki-laki
24	Muhzin Taukhid	Dukuh Dukuh	SLTA / Sederajat	Laki-Laki
25	Muhammad Hisyam	Dukuh Iroyudan	SLTA / Sederajat	Laki-Laki
26	Imam Muttaqin	Dukuh Kadisono	SLTA / Sederajat	Laki-Laki
27	Widayanto	Dukuh Kembanggede	SLTA / Sederajat	Laki-Laki
28	Whewen Lail Shaputra	Dukuh Karangber	Diploma IV/Strata I	Laki-Laki
29	Rifqi Fauzi	Dukuh Santan	SLTA / Sederajat	Laki-Laki
30	Riyanto	Dukuh Kalakijo	SLTA / Sederajat	Laki-Laki
31	Anwar Aswahadi	Dukuh Kedung	SLTA / Sederajat	Laki-Laki
32	Ichwan	Dukuh Bungsing	SLTA/SEDERAJAT	Laki-Laki
33	Mistijan	Dukuh Watugedug	SLTA/Sederajat	Laki-Laki
34	Yoga Pradana	Dukuh Pringgading	Diploma IV/Strata I	Laki-Laki

Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2025

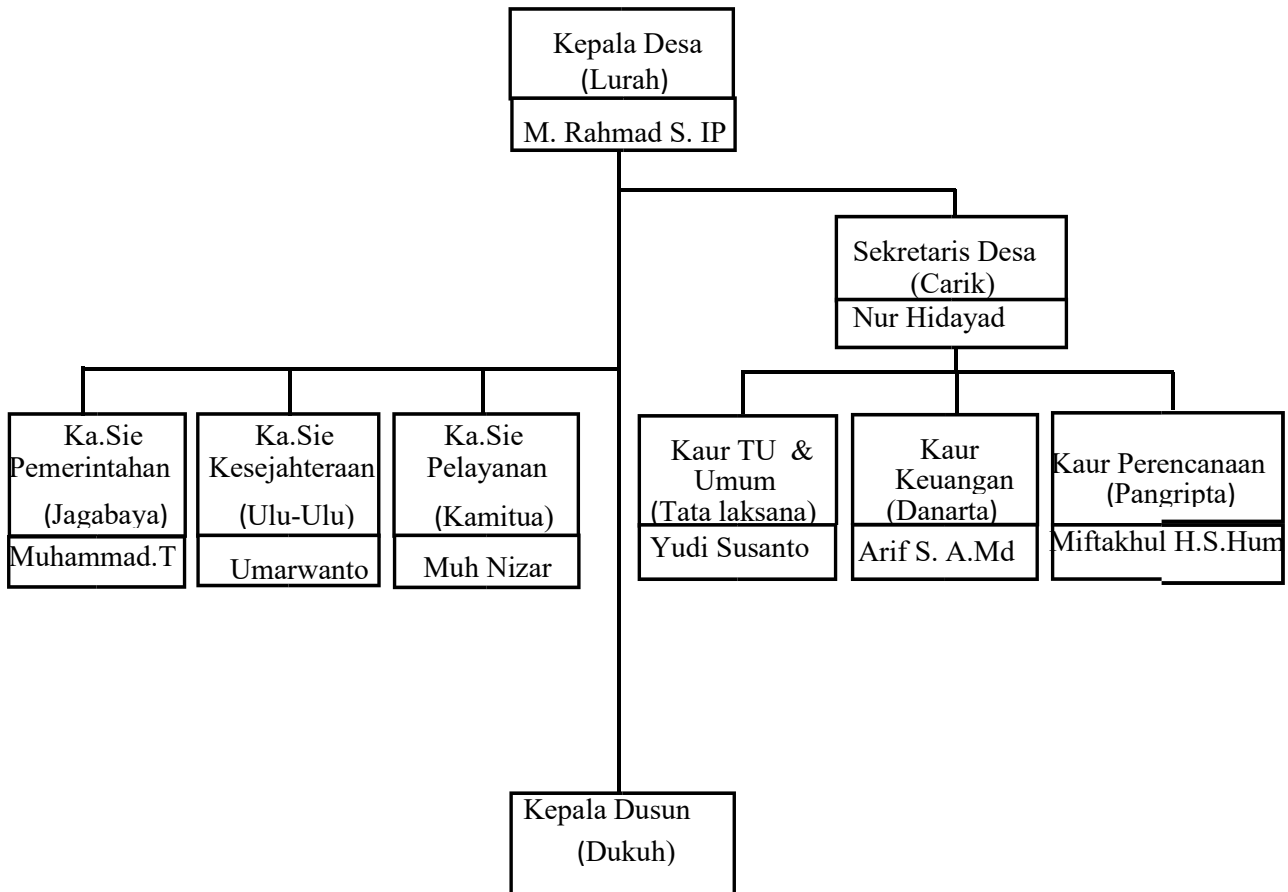
Dari hasil tabel diatas, terlihat bahwa profil pemerintah Kalurahan Guwosari didominasi oleh laki-laki, sementara itu perempuan terdapat 7 orang yang menduduki jabatan dari di pemerintahan kalurahan. Hal ini mengindikasikan masih terdapat perbedaan gender dalam komposisi kepemimpinan di tingkat kalurahan. Selain itu, dapat dilihat pula bahwa mayoritas anggota pemerintah Kalurahan Guwosari memiliki pendidikan tingkat SLTA/Sederajat. Meskipun tidak ada informasi spesifik mengenai tingkat pendidikan lainnya, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tingkat SLTA/Sederajat lebih dominan dalam kalangan anggota pemerintah desa

tersebut. Penting untuk membangun pemerintahan yang efektif, beragam latar belakang, pengalaman, dan pengetahuan sangat berharga untuk menghadapi berbagai tantangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara komprehensif.

Selain itu, penting juga untuk mendorong pendidikan yang beragam di kalangan anggota pemerintah Kalurahan dengan verifikasi tingkat pendidikan yang memungkinkan membawa perspektif yang berbeda-beda dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih komprehensif dan berimbang.

Gambar bagan 2.2 struktur organisasi pemerintah kalurahan guwosari

Struktur organisasi pemerintahan kalurahan guwosari




Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2025

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi pemerintah desa sudah dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pergub Nomor 25 Tahun 2019, Pemerintah Kalurahan Guwosari sudah menyusun struktur penyelesaian dengan cukup jelas sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.

G. Struktur Organisasi Pengelolaan Goa Selarong

Gambar 2: 3 Struktur organisasi pengelolaan Goa Selarong



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOMPLEK II PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Jalan Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp. (0274) 6460222, Kode Pos 55714, Email : dinas.pariwisata@bantulkab.go.id

DATA PETUGAS
DI OBYEK WISATA GOA SELARONG

No	Nama Petugas	Jenis Ketugasan	Lokasi Tugas	Kontak Person	Keterangan
1	SUDIYONO, A.Ma	Petugas Pemungut Retribusi	TPR Goa Selarong	081328754745	Koordinator
2	SURADI	Petugas Pemungut Retribusi	TPR Goa Selarong		
3	SUGIMAN	Petugas Pemungut Retribusi	TPR Goa Selarong		
4	SUPRIYOKO	Petugas Pemungut Retribusi	TPR Goa Selarong	087839050099	
5	NAJUN	Petugas Kebersihan	Goa		

Sumber: Profil Petugas Wisata Goa Selarong, 2025

Berdasarkan struktur organisasi pengelolaan Goa Selarong menunjukkan adanya empat orang petugas lapangan yang bekerja di bawah arahan satu orang koordinator. Kelima individu ini merupakan bagian dari sistem pengelolaan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul. Tugas utama mereka tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan wisata, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap kondisi fisik dan operasional objek wisata Goa Selarong secara rutin. Peran koordinator sangat vital dalam menjembatani komunikasi antara dinas terkait dan para petugas lapangan. Koordinator bertanggung jawab menyusun rencana kerja, mendistribusikan tugas kepada petugas, serta melaporkan perkembangan atau permasalahan yang ditemukan di lapangan kepada pihak dinas. Sementara itu, keempat petugas bertugas secara langsung untuk menjaga

kebersihan, kenyamanan, serta memberikan informasi kepada wisatawan yang berkunjung ke Goa Selarong.

Pembangian peran antara koodinator dan petugas memungkinkan alur kerja yang efektif seperti; pertama Efisiensi Operasional, struktur ini mampu mengoptimalkan pengelolaan kawasan wisata selama tidak terjadi lonjakan pengunjung yang ekstrem. Keberadaan satu koordinator memastikan bahwa tugas-tugas petugas lapangan tetap selaras dengan arahan dan kebijakan dari dinas. Kedua, Koordinasi yang terpusat, Model ini memberikan kejelasan alur komando, di mana setiap persoalan di lapangan dapat langsung dikoordinasikan melalui satu titik, yaitu koordinator dan Ketiga, peran ganda, petugas tidak hanya berfungsi sebagai penjaga, tetapi juga mengemban peran edukatif dan promotif terhadap wisatawan. Ini merupakan nilai tambah dalam pelayanan wisata, tetapi juga dapat membebani bila tidak dibarengi pelatihan yang memadai.

H. Wisata Goa Selarong

Goa Selarong merupakan salah satu objek wisata sejarah yang terletak di Dusun Kembang Putih, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Tempat ini dahulu menjadi lokasi persembunyian Pangeran Diponegoro dan pasukannya ketika melakukan perlawanan gerilya terhadap penjajah Belanda dalam kurun waktu 1825 hingga 1830. Goa ini tersembunyi di tengah lebatnya hutan dan dikelilingi bukit, menjadikannya lokasi yang strategis untuk gerilya. Terdapat dua goa utama: Goa Kakung (laki-laki) dan Goa Putri (perempuan), yang dipercaya sebagai

tempat beliau dan pengikutnya berlindung. Kini, Goa Selarong tidak hanya dikenal sebagai situs sejarah yang sarat nilai perjuangan, tetapi juga menjadi destinasi wisata unggulan di Bantul. Keindahan alamnya yang khas, dengan lanskap bukit kapur dan pepohonan yang rimbun, menjadikan kawasan ini cocok untuk wisatawan yang ingin mengenang jejak perjuangan Pangeran Diponegoro sembari menikmati suasana alam yang tenang dan menyegarkan. Goa Selarong bukan saja destinasi wisata sejarah yang kental akan perjuangan pahlawan nasional, tetapi juga menawarkan keindahan alam dan kegiatan budaya lokal yang kuat. Cocok bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana damai alam sekaligus memperkaya pemahaman sejarah lokal. (Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2025).

BAB III

PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN WISATA GOA SELARONG

A. Pemerintah Kalurahan sebagai fasilitator dalam Pengembangan wisata Goa Selarong.

Pemerintah Kalurahan memiliki peran strategis sebagai fasilitator dalam pengembangan destinasi wisata berbasis lokal, seperti Goa Selarong. Sebagai fasilitator, pemerintah desa tidak bertindak sebagai pelaku utama ekonomi wisata, tetapi lebih sebagai pihak yang menjembatani, memediasi, dan mendukung berbagai pihak agar pengembangan wisata berjalan secara partisipatif, berkelanjutan, dan sesuai dengan potensi lokal.

Pemerintah Kalurahan berperan untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat lokal, pelaku usaha, tokoh adat, pengelola wisata, dan instansi pemerintah daerah agar tercipta sinergi dalam merumuskan visi dan arah pengembangan Goa Selarong sebagai destinasi wisata budaya dan sejarah. Kalurahan dapat membantu proses legalisasi kelompok sadar wisata (pokdarwis), pengurusan izin usaha wisata lokal, hingga penyusunan peraturan kalurahan (perkal) yang mendukung perlindungan lingkungan dan pengelolaan berbasis kearifan lokal.

Sebagai fasilitator, pemerintah kalurahan aktif memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan wisata, mulai dari pelatihan pemandu wisata, pengembangan homestay, kuliner lokal, hingga pelestarian budaya. Pemerintah kalurahan memfasilitasi pertemuan, pelatihan, dan pendampingan agar

masyarakat memiliki kapasitas dan rasa memiliki terhadap kawasan wisata. Kalurahan membantu memperluas jejaring promosi Goa Selarong, baik melalui media sosial, event lokal, maupun kolaborasi dengan dinas pariwisata kabupaten. Hal ini juga mencakup pengembangan media promosi berbasis potensi lokal, seperti cerita sejarah Pangeran Diponegoro yang berkaitan dengan Goa Selarong.

Dalam perannya, pemerintah kalurahan menjaga agar pengembangan wisata tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Misalnya, dengan menjaga kebersihan, keamanan, serta melibatkan kelompok rentan seperti pemuda dan perempuan dalam kegiatan wisata.

Pengembangan wisata Pemerintah Kalurahan hadir sebagai Lembaga yang memberikan fasilitas terhadap pengelolaan wisata tersebut. Dalam wawancara Bersama, Nur Hidayad selaku carik, menyampaikan bahwa.

“Sejauh ini Pemerintah Kalurahan hanya memfasilitasi dalam bentuk pelatihan pengelolaan wisata, karena yang punya kewenangan penuh terkait pengembangan wisata Goa Selarong sudah diambil alih oleh dinas pariwisata Kabupaten Bantul” (Wawancara peneliti, 06 mei 2025).

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah kalurahan dalam pengembangan wisata Goa Selarong cukup memberikan kontribusi melalui peran sebagai fasilitator. Namun disisi lain menunjukan bahwa dalam pengelolaan wisata Goa Selarong kewenangan pemerintah kalurahan memiliki keterbatasan dalam memfasilitasi pengembangan wisata Goa Selarong, karena dalam pengelolaan wisata goa

selarong diambil alih oleh dinas pariwisata kabupaten Bantul. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dengan adanya undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tentu bertolak belakang dengan adanya intervensi dari dinas pariwisata kabupaten Bantul dalam pengelolaan wisata goa selarong.

Dengan adanya otonomi desa, sangat baik memberikan peluang bagi desa untuk mengelola potensinya sendiri, sehingga desa tidak hanya mengetahui kalau di wilayahnya ada Pembangunan yang diKelola oleh instansi pemerintahan lainnya, dan tidak hanya pula desa menawarkan nuansa kekayaan potensi yang ada di wilayahnya sendiri, tetapi perlu juga desa mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya sendiri.

Hal ini hasil wawancara di atas didukung juga oleh pernyataan Bapak Suradi selaku pengelola wisata Goa Selarong, perihal peran pemerintah kalurahan sebagai fasilitator wisata Goa Selarong.

“Setelah pengelolaan objek wisata Goa Selarong dialihkan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, pendanaan fasilitas sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Pemerintah kalurahan tidak lagi terlibat dalam pembiayaan, namun tetap memberikan dukungan melalui penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat, promosi pariwisata, serta dorongan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)”. (Wawancara peneliti, 09 Mei 2025).

Pengalihan pengelolaan objek wisata Goa Selarong kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam struktur tata kelola pariwisata lokal. Langkah ini menandai bahwa pergeseran peran pemerintah kalurahan dari pengelola langsung menjadi mitra pendukung.

Dalam konteks kebijakan publik, perubahan ini dapat dibaca sebagai bagian dari upaya penataan kewenangan agar pengelolaan destinasi wisata lebih terstruktur dan terintegrasi dalam kerangka pembangunan daerah. Namun, penting juga untuk dicermati bahwa keberhasilan pengelolaan destinasi tidak hanya bergantung pada lembaga pengelola, tetapi juga pada seberapa kuat jejaring kolaborasi yang terbangun antara berbagai aktor lokal.

Walaupun tidak lagi terlibat langsung dalam pembiayaan, pemerintah kabupaten tetap berperan aktif dalam mendukung pengembangan wisata melalui kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Pelatihan bagi warga, promosi destinasi, serta dorongan terhadap pelaku UMKM menjadi bentuk partisipasi yang strategis dalam mendorong keberlanjutan wisata berbasis komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fungsi administratif kabupaten mengalami pembatasan, secara sosial mereka tetap memiliki peran penting sebagai penghubung antara masyarakat lokal dan kebijakan formal dari pemerintah daerah.

Di sisi lain, model pengelolaan seperti ini mencerminkan prinsip kolaboratif dalam pengembangan pariwisata, di mana peran pemerintah tidak sepenuhnya terpusat, melainkan dibagi sesuai kapasitas dan kewenangan. Namun, dalam praktiknya, tantangan kerap muncul, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pendekatan *top-down* dari pemerintah kabupaten dan pendekatan *bottom-up* dari masyarakat lokal. Jika komunikasi dan sinergi tidak berjalan baik, maka potensi konflik peran maupun ketimpangan akses terhadap manfaat ekonomi wisata bisa terjadi.

Oleh karena itu, penting bagi Dinas Pariwisata dan pemerintah kalurahan untuk menjaga kesinambungan koordinasi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengembangan. Ketika masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam pembangunan wisata, maka nilai keberlanjutan dan rasa memiliki terhadap destinasi dapat lebih kuat terbangun. Dalam konteks Goa Selarong, praktik seperti pelatihan dan pemberdayaan UMKM menjadi contoh nyata bagaimana pembangunan pariwisata bisa tetap berpihak pada lokalitas dan kemanusiaan, tanpa kehilangan arah kebijakan strukturalnya.

B. Kebijakan Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan wisata Goa Selarong

Pemerintah kalurahan merupakan salah satu lembaga organisasi terkecil yang mempunyai peran penting dan memiliki kewenangan membuat kebijakan dan keputusan untuk kepentingan kalurahan berdasarkan kondisi kebutuhan warga masyarakat setempat. Kondisi dan kebutuhan yang dimaksud tentunya berdasarkan kehidupan warga masyarakat kalurahan, seperti pembangunan, sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam pengambilan kebijakan, pemerintah kalurahan tentu mempertimbangkan dan menyesuaikan aspirasi warga masyarakat kalurahan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Peran Pemerintah kalurahan dalam pengambilan kebijakan jika dipertimbangkan secara matang dengan baik, tentu menjadi batu loncatan kunci perubahan untuk menentukan arah perkembangan dan kemajuan suatu kalurahan.

Dalam pengembangan wisata pemerintah kalurahan hadir sebagai lembaga yang membuat kebijakan untuk mengatur dalam pengelolaan wisata tersebut. Dengan demikian, dalam wawancara Bapak Nur Hidayad selaku sekretaris menyampaikan bahwa;

“Sebenarnya pengelola wisata Goa Selarong itu adalah Pemerintah Kabupaten Bantul di bawah di dinas pariwisata Kabupaten Bantul sehingga kewenangan kabupaten Bantul di bawah dinas pariwisata kabupaten Bantul diatur Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 23 Tahun 2024 Tentang perubahan tarif redistribusi jasa usaha kepariwisataan. Jadi pemerintah kalurahan tidak ada kebijakan yang di buat, hanya mengetahui kalau disana ada pembangunan, Pemeliharaan maupun aktivitas”. (Wawancara peneliti pada tanggal, 06 Mei 2025)

Pengelolaan wisata Goa Selarong yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pariwisata, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 23 Tahun 2024 Tentang perubahan tarif redistribusi jasa usaha kepariwisataan, mencerminkan model tata kelola pariwisata yang terstruktur secara administratif. Kebijakan ini menegaskan peran sentral pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan dan pemeliharaan destinasi wisata strategis. Di satu sisi, pendekatan ini dapat memberikan kepastian hukum dan standar pelayanan publik yang lebih seragam. Namun di sisi lain, hal ini juga berpotensi mereduksi peran pemerintah kalurahan yang lebih dekat dengan masyarakat setempat.

Dalam rangka pengembangan wisata berbasis lokal, pembatasan peran kalurahan dalam membuat kebijakan dan hanya sebatas “mengetahui” aktivitas pembangunan atau pemeliharaan di kawasan wisata menyisakan ruang refleksi atas pentingnya prinsip partisipatif dalam tata kelola destinasi. Kalurahan yang seharusnya menjadi simpul komunikasi antara masyarakat dan pengelola sering kali tidak dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan. Akibatnya, ada jarak antara kebijakan teknokratis dengan realitas sosial di tingkat akar rumput, di mana masyarakat sesungguhnya menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem wisata.

Meski secara formal kalurahan tidak memiliki kewenangan teknis, penting untuk melihat bahwa keberadaan mereka tetap vital sebagai penjaga kearifan lokal dan pembangun kepercayaan sosial di tengah masyarakat. Ketika pengelolaan dilakukan secara sentralistik, resiko terbesarnya bukan hanya pada hilangnya partisipasi, tetapi juga pada lemahnya rasa memiliki dari masyarakat terhadap destinasi wisata tersebut. Padahal, keberlanjutan wisata sangat bergantung pada keterlibatan aktif warga dalam menjaga, merawat, serta turut mempromosikan nilai-nilai lokal yang menjadi daya tarik utama kawasan wisata seperti Goa Selarong.

Oleh karena itu, meskipun regulasi menempatkan kewenangan utama di tangan kabupaten, ruang kolaborasi dengan pemerintah kalurahan tetap perlu dihidupkan. Hal ini tidak hanya untuk menciptakan harmoni dalam pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap peran sosial dan budaya masyarakat lokal. Keterlibatan kalurahan meskipun bukan

dalam ranah pengambilan keputusan structural dapat menjadi jembatan antara kebijakan teknis dan praktik kemasyarakatan yang lebih inklusif, sehingga destinasi seperti Goa Selarong tidak sekadar menjadi tempat wisata, tetapi juga ruang hidup bersama yang dihargai oleh semua pihak.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Muhaimin selaku Bamuskal.

Dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan;

“Objek wisata Goa Selarong dikelola oleh Dinas Pariwisata. Selanjutnya, Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Pemerintah Kalurahan Guwosari. Pengelolaan area parkir di kawasan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain itu, terdapat pula destinasi wisata Banjaran yang lokasinya berdekatan dengan Goa Selarong, yang juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaannya”. (wawancara peneliti pada tanggal, 22 Mei 2025)

Pengelolaan objek wisata Goa Selarong oleh Dinas Pariwisata, dengan dukungan kerjasama bersama Pemerintah Kalurahan Guwosari, mencerminkan bentuk tata kelola yang bersifat kolaboratif antara pemerintah daerah dan pemerintah tingkat lokal. Dalam praktik ini, kewenangan administratif tetap berada pada tingkat kabupaten, namun pelibatan kalurahan sebagai mitra strategis memberi ruang bagi integrasi perspektif lokal dalam pengelolaan destinasi. Kolaborasi semacam ini menjadi penting, terutama ketika wisata tidak hanya dipahami sebagai ruang ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan kultural masyarakat.

Fakta bahwa pengelolaan area parkir dipercayakan sepenuhnya kepada masyarakat setempat merupakan indikator penting dari partisipasi warga dalam kegiatan wisata. Keterlibatan ini tidak hanya bersifat simbolis, melainkan

memberikan dampak nyata terhadap penguatan ekonomi lokal. Masyarakat tidak sekedar menjadi penonton atau penerima manfaat pasif, melainkan ikut serta dalam rantai aktivitas wisata secara langsung. Dalam konteks ini, partisipasi warga juga menjadi sarana untuk membangun rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap destinasi wisata di lingkungan mereka sendiri.

Di sisi lain, kemitraan semacam ini juga menunjukkan bahwa desentralisasi pengelolaan dapat dilakukan secara selektif dan bertahap. Meskipun otoritas utama berada di tangan dinas teknis, namun melalui pemberian ruang pengelolaan seperti parkir, masyarakat mendapatkan akses konkret terhadap sumber ekonomi baru. Ini menjadi bentuk pengakuan terhadap kapasitas lokal yang selama ini sering kali terpinggirkan dalam skema pembangunan berbasis proyek. Ketika masyarakat diberikan kepercayaan, muncul ruang belajar kolektif dalam mengelola, menjaga, dan meningkatkan kualitas pelayanan wisata.

Keterlibatan warga dalam destinasi wisata Banjaran yang berdekatan dengan Goa Selarong juga memperkuat praktik kolaboratif yang berbasis pada potensi lokal. Ini menandakan bahwa semangat gotong royong dan kearifan lokal masih hidup dan relevan dalam konteks pembangunan pariwisata masa kini. Ketika masyarakat dilibatkan sejak awal, bukan hanya manfaat ekonomi yang diperoleh, tetapi juga tercipta dialog sosial yang mempertemukan kebijakan teknokratis dengan nilai-nilai komunitas. Hal ini penting dalam mendorong keberlanjutan pariwisata yang tidak hanya berpihak pada angka kunjungan, tetapi juga pada kualitas kehidupan warga di sekitarnya.

Dengan demikian, pengelolaan Goa Selarong dan Banjaran mencerminkan model tata kelola hibrida yang menggabungkan kekuatan negara dan kapasitas masyarakat. Meskipun masih terbatas pada aspek-aspek tertentu, seperti parkir atau aktivitas pendukung lainnya, pola ini bisa menjadi pijakan untuk membangun sistem pengelolaan wisata yang lebih demokratis dan kontekstual. Dalam dunia yang terus bergerak ke arah pembangunan berbasis partisipasi, pengalaman seperti ini menjadi penting untuk dihargai, diperkuat, dan direplikasi dengan tetap memperhatikan keragaman lokal dan dinamika sosial yang ada.

Hal yang disampaikan oleh bapak Mursidi, selaku pengelola wisata Goa Selarong. Dalam wawancara tersebut menyampaikan.

“Ya tidak ada, tidak bersangkutan disini karena yang mengelola wisata Goa Selarong sudah lain yaitu dari dinas pariwisata Kabupaten Bantul. Ya ada pun kebijakan yang dilakukan dari kalurahan cuman mengumpulkan yang mempunyai warung dan kerajinan itu mas, Kalau masalah soal Goa Selarong itu sudah dinas wisata yang tanggung”.(wawancara peneliti pada tanggal, 06 Mei 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam struktur pengelolaan wisata Goa Selarong, terjadi pemisahan kewenangan yang cukup tegas antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kalurahan. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menjadi aktor utama yang memegang kendali penuh atas pengelolaan destinasi, sementara pemerintah kalurahan hanya berperan dalam aspek-aspek pendukung yang tidak bersinggungan langsung dengan pengelolaan teknis destinasi. Situasi ini memperlihatkan model tata kelola top-down yang

cenderung menempatkan aktor lokal pada posisi marginal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Namun demikian, keterlibatan pemerintah kalurahan dalam mengkoordinasikan pelaku usaha warung dan perajin lokal merupakan bentuk kontribusi yang tetap penting dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Meski ruang geraknya terbatas, upaya ini mencerminkan kesadaran pemerintah kalurahan terhadap pentingnya memfasilitasi ekonomi lokal agar tetap mendapatkan manfaat dari aktivitas pariwisata di sekitar mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun tidak dilibatkan secara struktural dalam pengelolaan destinasi, pemerintah kalurahan tidak sepenuhnya pasif dan tetap mencari cara untuk memastikan bahwa masyarakatnya terhubung dengan sektor wisata.

Fenomena ini sekaligus mencerminkan ketimpangan dalam distribusi peran dan otoritas antara level pemerintahan. Ketika kewenangan pengelolaan terpusat di tingkat kabupaten, ada resiko munculnya keterputusan komunikasi dan kurangnya kepekaan terhadap kondisi sosial, budaya, maupun kebutuhan masyarakat lokal. Pemerintah kalurahan yang sebenarnya berada paling dekat dengan warga justru tidak diberikan ruang yang cukup untuk ikut menentukan arah pengembangan destinasi. Akibatnya, potensi partisipasi warga sebagai subjek pembangunan wisata tidak teraktualisasi secara optimal.

Dari sisi keberlanjutan, pendekatan semacam ini dapat menjadi kendala bagi pembangunan wisata yang berakar pada komunitas. Keterlibatan masyarakat yang hanya terbatas pada sektor informal seperti warung atau

kerajinan, tanpa akses terhadap pengambilan keputusan strategis, bisa menimbulkan rasa terpinggirkan. Padahal, pelibatan aktif warga dalam seluruh aspek dari perencanaan hingga pelaksanaan merupakan syarat penting untuk membangun rasa memiliki, meningkatkan kualitas layanan, serta menjaga kelestarian destinasi dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, ke depan diperlukan pembukaan ruang dialog yang lebih inklusif antara Dinas Pariwisata, pemerintah kalurahan, dan masyarakat lokal. Meskipun regulasi menempatkan dinas sebagai pemegang kewenangan utama, namun tata kelola yang kolaboratif tidak harus selalu ditentukan oleh struktur formal. Justru dalam konteks sosial seperti ini, diperlukan keberanian untuk melibatkan suara-suara lokal secara lebih bermakna. Sebab, pembangunan pariwisata sejatinya bukan hanya soal infrastruktur atau angka kunjungan, melainkan tentang bagaimana masyarakat di sekitarnya dapat tumbuh, merasa dihargai, dan menjadi bagian dari cerita yang mereka miliki sendiri.

Hal yang disampaikan oleh ibu Ituk selaku Masyarakat yang buka usaha warung makan di area wisata goa selarong. Dalam wawancara tersebut menyampaikan.

“Sejauh yang saya ketahui, tidak terdapat kebijakan atau program dari pemerintah kalurahan yang secara khusus ditujukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata Goa Selarong. Hal ini disebabkan karena pengelolaan wisata Goa Selarong sepenuhnya berada di bawah kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten”.(Wawancara peneliti pada Tanggal, 21 Mei 2025)

Pernyataan diatas bahwa tidak terdapat kebijakan atau program dari pemerintah kalurahan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam

pembangunan wisata Goa Selarong mengindikasikan adanya keterbatasan ruang gerak pemerintah desa dalam urusan kepariwisataan. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun desa atau kalurahan berada paling dekat secara geografis dan sosial dengan masyarakat, mereka tidak selalu memiliki kewenangan atau instrumen kebijakan untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan sektor wisata, terutama ketika destinasi tersebut telah ditetapkan sebagai wilayah kewenangan pemerintah kabupaten.

Ketidakhadiran program dari pemerintah kalurahan dapat dipahami sebagai konsekuensi dari struktur tata kelola yang cenderung sentralistik, di mana kewenangan penuh didelegasikan kepada Dinas Pariwisata. Dalam sistem seperti ini, peran pemerintah lokal seringkali tereduksi hanya sebagai pengamat atau pelengkap, bukan sebagai penggerak utama. Hal ini menimbulkan tantangan dalam membangun pariwisata yang inklusif, karena aktor-aktor lokal yang memiliki pemahaman lebih mendalam terhadap dinamika sosial masyarakat sekitar destinasi justru tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengembangan.

Padahal, dalam kerangka pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*), peran pemerintah kalurahan sangat strategis. Kalurahan dapat berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan formal tingkat atas dan kebutuhan warga di tingkat bawah. Ketika tidak ada program yang menjembatani partisipasi warga, maka pengembangan wisata cenderung bersifat teknokratis dan minim sentuhan sosial. Ini dapat berdampak pada rendahnya rasa memiliki

masyarakat terhadap destinasi wisata yang ada, sehingga potensi dukungan dari warga lokal pun menjadi terbatas.

Ketidakaktifan pemerintah kalurahan juga dapat dibaca sebagai gejala dari relasi kuasa yang timpang dalam pengelolaan pariwisata. Ketika satu lembaga memiliki otoritas penuh tanpa melibatkan aktor lokal, maka partisipasi masyarakat cenderung bersifat formalitas atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Ini bukan hanya persoalan teknis administrasi, tetapi juga mencerminkan kurangnya kesadaran akan pentingnya partisipasi warga sebagai salah satu pilar pembangunan berkelanjutan.

Meski demikian, absennya program dari kalurahan tidak selalu mencerminkan sikap pasif atau ketidakpedulian. Bisa jadi, kalurahan sendiri tidak diberi ruang secara regulatif maupun anggaran untuk berperan lebih dalam. Dalam konteks ini, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih kolaboratif dan adaptif dimana dinas pariwisata dapat bekerja sama secara fungsional dengan kalurahan untuk mengaktifkan potensi lokal. Kolaborasi ini bukan hanya soal pembagian tugas, tetapi tentang pengakuan terhadap peran dan identitas sosial yang dimiliki masing-masing aktor dalam ekosistem wisata.

Dengan demikian, pengembangan wisata seperti Goa Selarong akan lebih berkelanjutan jika dibangun melalui sinergi antara dinas, pemerintah kalurahan, dan masyarakat. Setiap pihak memiliki kekuatan dan perspektif unik yang saling melengkapi. Ketika warga diberi ruang dan didampingi untuk berpartisipasi, dan pemerintah lokal dilibatkan sebagai mitra aktif, maka

pariwisata bukan hanya menjadi agenda ekonomi, tetapi juga menjadi ruang pemberdayaan yang bermakna bagi komunitas yang tinggal di sekitarnya.

Hal juga yang disampaikan oleh Rusdi selaku Masyarakat yang buka usaha warung makan di area wisata goa selarong. Dalam wawancara menyampaikan.

“Tidak ada, Saat ini tidak terdapat kebijakan dari pemerintah kalurahan yang secara khusus mendorong pengembangan usaha kami. Keadaannya masih stagnan seperti ini saja. Program sosialisasi, pelatihan, maupun bentuk pendampingan lainnya juga tidak tersedia. Bahkan dari Dinas Pariwisata pun tidak ada dukungan, terutama sejak terjadinya pergantian ketua pengelola wisata Goa Selarong.” (Wawancara peneliti pada tanggal, 09 Mei 2025)

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya ketidakpuasan dan kekecewaan dari pelaku usaha lokal terhadap minimnya dukungan kebijakan, baik dari pemerintah kalurahan maupun dari Dinas Pariwisata, dalam konteks pengembangan usaha yang terhubung dengan aktivitas pariwisata di sekitar Goa Selarong. Situasi ini memperlihatkan lemahnya komitmen kelembagaan dalam memberikan ruang pemberdayaan kepada masyarakat lokal, khususnya mereka yang secara langsung menggantungkan kehidupannya pada sektor pariwisata.

Ketidakhadiran program sosialisasi, pelatihan, maupun bentuk pendampingan lainnya dari pemerintah kalurahan menunjukkan adanya kekosongan peran yang seharusnya dapat diisi oleh pemerintah tingkat lokal sebagai fasilitator dan penghubung antara masyarakat dan dinas terkait. Pemerintah kalurahan sejatinya memiliki potensi untuk menjadi aktor strategis dalam pembangunan wisata berbasis komunitas, karena kedekatan sosial dan

kulturalnya dengan warga. Namun dalam realitas ini, peran tersebut tidak dijalankan secara maksimal, yang akhirnya membuat masyarakat merasa berjalan sendiri tanpa arahan maupun dukungan struktural.

Lebih jauh, ketidakhadiran dukungan dari Dinas Pariwisata pasca pergantian ketua pengelola menunjukkan lemahnya kontinuitas dan konsistensi kebijakan. Padahal, keberlanjutan sebuah destinasi wisata sangat dipengaruhi oleh kesinambungan komunikasi dan pembinaan terhadap komunitas lokal yang terlibat. Ketika kepemimpinan berubah tanpa diiringi dengan mekanisme transisi yang melibatkan warga, maka hubungan emosional dan fungsional antara masyarakat dan lembaga pengelola bisa terputus. Ini berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat serta menurunkan partisipasi aktif mereka dalam mendukung kegiatan wisata.

Dalam perspektif pembangunan partisipatif, kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara ekspektasi masyarakat dan kenyataan kebijakan. Masyarakat lokal berharap adanya dukungan nyata agar mereka dapat berkembang secara ekonomi melalui sektor pariwisata, namun absennya kebijakan responsif membuat mereka merasa stagnan. Akibatnya, potensi pariwisata sebagai pengungkit kesejahteraan lokal menjadi tidak optimal, bahkan bisa menimbulkan apatisme jika terus dibiarkan tanpa intervensi yang tepat.

Sangat disayangkan bahwa dalam konteks Goa Selarong yang memiliki nilai sejarah dan potensi wisata yang cukup besar masih terjadi disintegrasi antara pengelola formal, pemerintah lokal, dan warga. Untuk menciptakan tata

kelola yang berkeadilan, seharusnya setiap perubahan struktur kepengurusan disertai dengan pelibatan masyarakat dalam proses komunikasi dan evaluasi. Di sinilah pentingnya mekanisme dialog berkala yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Dengan demikian, pengembangan wisata yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada aspek fisik atau promosi destinasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat merasa didengar, dilibatkan, dan diberdayakan. Ketika kebijakan absen dan pelatihan tidak diberikan, maka pembangunan wisata menjadi kehilangan roh sosialnya. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran lintas level pemerintahan untuk membangun sinergi yang melibatkan warga sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan. Dengan begitu, pariwisata akan tumbuh bukan hanya sebagai sektor ekonomi, tetapi juga sebagai ruang bersama yang menyatukan aspirasi dan martabat komunitas lokal.

Hal yang disampaikan oleh Ibu Tri Sugianti selaku Masyarakat yang buka usaha buat patung di sekitar wisata Goa Selarong. Dalam wawancara menyampaikan.

“Program dari pemerintah kalurahan sebenarnya ada, namun tidak bersifat rutin. Sementara itu, dari pihak pemerintah kabupaten, khususnya melalui dinas terkait, terdapat kegiatan seperti studi tiru yang ditujukan bagi pelaku UMKM se-Kabupaten Bantul. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah kalurahan hanya mengikutsertakan beberapa orang sebagai perwakilan untuk ambil bagian dalam program tersebut.”(Wawancara peneliti pada tanggal, 21 Mei 2025)

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya upaya sporadis dari pemerintah kalurahan dalam mendorong partisipasi masyarakat, khususnya

pelaku UMKM, dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas. Meskipun program dari kalurahan diakui ada, namun sifatnya tidak konsisten atau berkelanjutan. Ketidakteraturan program ini menunjukkan lemahnya perencanaan strategis dalam membina pelaku usaha lokal secara jangka panjang. Padahal, konsistensi program merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan perubahan yang bermakna.

Partisipasi dalam program studi tiru yang difasilitasi oleh Dinas Kabupaten merupakan bentuk intervensi dari level pemerintahan yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa ada inisiatif positif dari Dinas dalam memperkuat kapasitas pelaku UMKM, meskipun implementasinya masih bersifat selektif dan terbatas. Fakta bahwa hanya beberapa orang saja yang diwakilkan oleh kalurahan untuk mengikuti kegiatan tersebut menjadi refleksi akan terbatasnya akses partisipatif masyarakat secara luas. Proses seleksi yang tidak menyentuh seluruh pelaku usaha bisa menimbulkan kesenjangan informasi dan kesempatan antara warga.

Dalam konteks pembangunan berbasis masyarakat, keterlibatan yang bersifat representatif seperti ini sering kali menimbulkan jarak sosial. Warga yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan akan sulit merasakan manfaat riil dari program yang dilaksanakan. Hal ini juga berpotensi menimbulkan persepsi eksklusivitas dan rasa tidak diikutsertakan dalam proses pembangunan, yang pada akhirnya bisa mengurangi antusiasme dan rasa memiliki terhadap program pengembangan pariwisata dan UMKM.

Dari sisi kelembagaan, kondisi ini menunjukkan bahwa kalurahan belum memiliki kapasitas kelembagaan dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan sistematis. Ketergantungan pada program dari dinas kabupaten menunjukkan bahwa arah kebijakan lokal belum sepenuhnya digerakkan oleh kebutuhan masyarakat setempat, melainkan masih sangat dipengaruhi oleh dinamika dari atas. Idealnya, kalurahan dapat berperan lebih aktif sebagai perancang program yang berbasis kebutuhan warga serta sebagai penyambung kepentingan masyarakat dengan kebijakan kabupaten.

Selain itu, pelibatan sebagian kecil masyarakat dalam kegiatan study tiru tidak cukup untuk menghasilkan dampak perubahan kolektif. Diperlukan mekanisme umpan balik yang memungkinkan peserta membagikan pengetahuan dan pengalaman kepada komunitasnya secara luas. Dengan demikian, manfaat program dapat menyebar lebih merata dan berkontribusi pada peningkatan kapasitas sosial secara kolektif. Di sinilah pentingnya desain kebijakan yang tidak hanya berhenti pada pelatihan, tetapi juga mendorong replikasi, pendampingan lanjutan, dan penguatan kelembagaan lokal.

Dalam analisis ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat inisiatif positif dalam bentuk program pengembangan UMKM, baik dari kalurahan maupun dinas kabupaten, pelaksanaannya belum menyentuh esensi partisipasi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Ke depan, diperlukan perbaikan dalam hal perencanaan, pelibatan warga, dan keberlanjutan program, agar pengembangan pariwisata dan UMKM tidak hanya menjadi proyek kebijakan

sesaat, tetapi menjadi bagian dari proses pemberdayaan yang terstruktur dan menyeluruh. Pendekatan semacam ini akan mendorong terbentuknya ekosistem wisata yang lebih adil, inklusif, dan berbasis pada kekuatan komunitas lokal.

Hal yang disampaikan oleh Ibu Suarni selaku buka usaha warung makan di sekitar wisata goa selarong. Dalam wawancara menyampaikan.

“Program dari pemerintah kalurahan yang berkaitan dengan usaha UMKM dalam mendukung pengembangan wisata Goa Selarong mungkin memang ada. Namun, kami selaku pelaku UMKM yang menjalankan usaha di sekitar kawasan wisata Goa Selarong tidak dilibatkan secara langsung, sehingga kami kurang mengetahui secara pasti terkait keberadaan maupun pelaksanaannya”.(Wawancara peneliti pada tanggal, 09 Mei 2025)

Pernyataan tersebut mencerminkan minimnya komunikasi dan keterlibatan antara pemerintah kalurahan dan pelaku UMKM lokal dalam konteks pengembangan pariwisata Goa Selarong. Ketidakjelasan informasi mengenai program-program pemerintah serta ketidakterlibatan pelaku usaha lokal dalam kegiatan tersebut menandakan lemahnya mekanisme partisipasi dan koordinasi dalam pengelolaan sektor pariwisata berbasis komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada inisiatif dari pihak kalurahan, belum tentu inisiatif tersebut menyentuh langsung kebutuhan dan pelaku utama di lapangan.

Pelaku UMKM merupakan salah satu aktor penting dalam mendukung ekosistem pariwisata, terutama di destinasi yang memiliki kunjungan harian seperti Goa Selarong. Ketika pelaku usaha di sekitar destinasi tidak dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program, maka peluang untuk menciptakan sinergi antara pariwisata dan ekonomi lokal menjadi tidak optimal. Partisipasi tidak hanya sebatas kehadiran fisik dalam forum-forum resmi,

melainkan melibatkan keterlibatan yang sejajar dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan manfaat.

Ketidakterlibatan pelaku UMKM juga menimbulkan persoalan representasi. Pemerintah kalurahan mungkin telah menjalankan program tertentu, namun tanpa upaya membangun komunikasi dua arah, masyarakat akan tetap merasa terasing dari kebijakan yang seharusnya menyasar mereka. Ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan, bahkan resistensi terhadap program-program yang diluncurkan, terutama jika hasilnya tidak tampak secara langsung oleh warga yang sehari-hari berada di sekitar kawasan wisata.

Secara lebih luas, kondisi ini mencerminkan tantangan dalam membangun tata kelola pariwisata yang inklusif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Pendekatan yang top-down di mana program dirancang tanpa terlebih dahulu memetakan kebutuhan, potensi, dan aspirasi local seringkali menghasilkan kebijakan yang tidak efektif. Masyarakat tidak merasa memiliki program tersebut, dan pada akhirnya kontribusi mereka terhadap keberlanjutan pariwisata pun minim. Padahal, keberhasilan pengembangan destinasi wisata sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif dan rasa memiliki dari warga sekitar.

Untuk mengatasi hal ini, penting bagi pemerintah kalurahan dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun sistem komunikasi yang terbuka dan partisipatif. Proses pengambilan keputusan dalam pengembangan pariwisata hendaknya diawali dengan forum diskusi bersama pelaku UMKM, tokoh masyarakat, dan pengelola destinasi. Dengan melibatkan mereka sejak

tahap awal, akan tercipta rasa saling percaya serta komitmen kolektif dalam mendukung keberlanjutan destinasi.

Sebagai penutup, pengembangan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Ketika pelaku usaha lokal merasa tidak dilibatkan, maka peluang untuk menciptakan model pariwisata yang adil dan memberdayakan akan terhambat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas partisipasi masyarakat dan perbaikan pola komunikasi antara pemerintah kalurahan dan warga merupakan prasyarat penting dalam membangun destinasi wisata yang berkelanjutan dan bermartabat.

C. Pengorganisasian dalam Pengembangan Wisata Goa Selarong

Pemerintah kalurahan memiliki kedudukan yang strategis dalam membuka jalan untuk mengarahkan pengembangan destinasi wisata di wilayahnya. Sebagai pengelola, Pemerintahan yang berdekatan langsung dengan Masyarakat, tentu peran pemerintah kalurahan sangat berpotensi aktif dalam menggali, mengorganisasikan, dan mengembangkan potensi wisata lokal agar mampu memberikan dampak dan manfaat yang positif terhadap warga masyarakat kalurahan secara menyeluruh.

Oleh karena itu dalam pengembangan wisata pemerintah kalurahan hadir sebagai menjembatani dalam membentuk pengorganisasian masyarakat untuk mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan wisata. Selain peran pemerintah kalurahan membuat pengorganisasian masyarakat dalam pengembangan wisata juga mempunyai peran untuk membangun kerja sama dengan instansi pemerintahan lainnya.

Dengan demikian, dalam wawancara Bersama Nur Hidayad selaku carik kalurahan guwosari menyampaikan.

“Ya kami sebagai Pemerintah kalurahan mengorganisasi Masyarakat guna agar bisa ikut terlibat dalam pengembangan wisata Goa Selarong maupun wisata banjaran. Kami juga bentuk Pokdarwis, BUM Kalurahan, dan mengadakan pelatihan supaya warga Masyarakat punya ketrampilan. tetapi Kalau di wisata Goa Selarong itu sudah kewenangan Dinas Pariwisata kabupaten Bantul, jadi kami sebagai pemerintah kalurahan mendorong serta memberikan pelatihan saja kepada Masyarakat maupun Masyarakat yang buka usaha di sekitaran wisata Goa Selarong”.(Wawancara peneliti pada tanggal, 06 Mei 2025)

Pernyataan tersebut mencerminkan peran aktif pemerintah kalurahan dalam mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan sektor pariwisata. Secara normatif, pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Good Governance*, di mana kolaborasi antara pemerintah desa dan warga menjadi pondasi penting dalam membangun ekosistem wisata yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya pembentukan kelembagaan seperti Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dan penguatan BUM Kalurahan (Badan Usaha Milik kalurahan) menunjukkan adanya kesadaran struktural terhadap pentingnya pemberdayaan kelembagaan lokal sebagai penggerak utama kegiatan ekonomi berbasis pariwisata.

Namun, pernyataan tersebut juga mengindikasikan adanya batasan kewenangan yang cukup tegas antara pemerintah kalurahan dan pemerintah kabupaten, khususnya terkait pengelolaan destinasi wisata yang telah ditetapkan sebagai aset daerah, seperti Goa Selarong. Dalam konteks ini, pemerintah kalurahan hanya dapat berperan sebagai fasilitator dan motivator, bukan sebagai

pengelola langsung. Hal ini mencerminkan kompleksitas tata kelola multi-level dalam sektor pariwisata, di mana koordinasi antar level pemerintahan menjadi kunci penting agar peran dan kontribusi masyarakat lokal tidak terpinggirkan dalam sistem yang lebih besar.

Walaupun demikian, semangat untuk terus memberikan pelatihan dan mendorong keterampilan warga di sekitar kawasan wisata patut diapresiasi. Ini menjadi bentuk nyata dari model pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek, tetapi subjek dari pembangunan itu sendiri. Tantangannya ke depan adalah memastikan bahwa pelibatan ini tidak hanya bersifat seremonial atau programatis, tetapi benar-benar membuka akses pada nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Integrasi antara kebijakan tingkat desa dan kabupaten perlu terus dikawal agar kolaborasi lintas level pemerintahan tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga strategis dan berpihak pada kepentingan warga.

Hal yang disampaikan oleh Bapak Mursidi perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selaku pengelola Wisata Goa Selarong menyampaikan.

“Ya kami melihat Pemerintah Kalurahan cukup aktif sebagai mengorganisir masyarakat. Pemerintah kalurahan mereka mampu menyatukan Masyarakat, membentuk kelembagaan lokal seperti Pokdarwis, BUMKal, berkomunikasi dengan pihak lainnya. Di lain sisi yang walaupun sudah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Bantul melalui dinas pariwisata dalam pengelolaan wisata Goa Selarong ini”. (Wawancara peneliti pada tanggal, 06 Mei 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap peran strategis Pemerintah Kalurahan dalam membangun kapasitas sosial masyarakat

dan mengorganisasi partisipasi warga dalam sektor pariwisata. Pemerintah Kalurahan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai simpul penghubung antar aktor lokal dalam ekosistem pembangunan desa. Pembentukan kelembagaan seperti Pokdarwis dan BUM Kalurahan menandai adanya kesadaran konstitusional bahwa pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat memerlukan wadah yang terstruktur agar partisipasi warga dapat berjalan secara berkesinambungan dan terarah.

Namun, pernyataan tersebut juga menyingkap realitas pembagian kewenangan yang belum sepenuhnya harmonis. Di satu sisi, Pemerintah Kalurahan berinisiatif mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif; di sisi lain, kewenangan formal pengelolaan objek wisata Goa Selarong berada pada level pemerintah kabupaten melalui Dinas Pariwisata. Situasi ini menegaskan pentingnya sinergi lintas jenjang pemerintahan agar tidak terjadi kesenjangan antara semangat partisipatif di tingkat desa dan pengambilan keputusan yang bersifat top-down di tingkat kabupaten. Ketimpangan semacam ini berisiko mereduksi daya inisiatif masyarakat lokal jika tidak diakomodasi secara adil dalam mekanisme pengelolaan.

Di tengah keterbatasan tersebut, semangat kolaboratif yang dibangun oleh Pemerintah Kalurahan patut diapresiasi sebagai model kepemimpinan lokal yang adaptif dan transformatif. Kemampuan mereka dalam membangun komunikasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci penting untuk menciptakan ruang negosiasi yang lebih setara antara masyarakat desa dan institusi di level kabupaten. Oleh karena itu, ke depan diperlukan kebijakan

yang mendorong desentralisasi kewenangan secara fungsional, khususnya dalam konteks pengelolaan potensi wisata lokal. Dengan begitu, tidak hanya pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab, tetapi pemerintah kalurahan dan masyarakat juga memiliki peran substantif dalam merancang dan mengelola masa depan pariwisata secara kolektif.

Hal ini juga yang di sampaikan oleh ibu Tri Sugianti selaku Masyarakat yang buka usaha buat patung di sekitar wisata Goa Selarong. Dalam wawancara menyampaikan.

“Ya kalau peran pemerintah yang kami rasakan, sebagai Masyarakat yang menerima manfaat dari pemerintah merasa bahwa kami juga ikut terlibat, meskipun kami tidak menguasai semuanya. Contohnya kami sebagai POkdarwis diorganisir langsung oleh pemerintah seperti memberikan pelatihan, peningkatan ketrampilan”.
(Wawancara peneliti pada tanggal, 21 Mei 2025)

Pernyataan dari perwakilan masyarakat ini mencerminkan adanya hubungan timbal balik yang cukup sehat antara Pemerintah Kalurahan dan warga dalam pengembangan pariwisata lokal. Masyarakat merasa diikutsertakan dalam proses pembangunan, meskipun tidak memegang kendali penuh atas seluruh aspek pengelolaan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bersifat partisipatif, dengan memberikan ruang bagi warga untuk berperan sesuai kapasitas dan peran sosialnya. Model ini relevan dengan pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT), di mana masyarakat bukan sekadar objek pembangunan, melainkan menjadi bagian aktif dari proses tersebut.

Keterlibatan Pokdarwis yang diorganisir langsung oleh pemerintah desa menjadi bukti konkret bahwa ada niat untuk memperkuat kelembagaan sosial di tingkat lokal. Pemberian pelatihan dan peningkatan keterampilan mencerminkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya mendorong partisipasi simbolik, tetapi juga memastikan adanya transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas warga. Upaya ini menjadi penting agar masyarakat memiliki daya saing dan mampu mengambil peran lebih besar dalam rantai nilai pariwisata, bukan sekadar menjadi pelengkap administratif atau tenaga kerja kasar dalam industri pariwisata lokal.

Meski demikian, pernyataan “kami tidak menguasai semuanya” menyiratkan bahwa masih terdapat keterbatasan ruang kontrol yang dimiliki oleh masyarakat dalam keseluruhan proses pengelolaan wisata. Hal ini membuka ruang diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana menciptakan distribusi peran dan kewenangan yang lebih adil, terutama dalam konteks tata kelola multi-level antara pemerintah desa, kabupaten, dan masyarakat. Ke depan, penguatan partisipasi masyarakat tidak hanya cukup dalam bentuk pelatihan, tetapi juga perlu dibarengi dengan kebijakan yang memberikan otonomi lebih luas kepada kelembagaan lokal agar mampu mengelola potensi wisata secara mandiri dan berkelanjutan.

D. Pemerintah Kalurahan sebagai motivator dalam pengembangan wisata

Goa Selarong

Pada aspek ini pemerintah kalurahan sebagai motivator berperan penting dalam menumbuhkan semangat, kesadaran, serta mendorong keterlibatan aktif

masyarakat untuk Bersama-sama dalam pengembangan potensi wisata yang ada di dalam kalurahan. Dalam peran ini sangat penting karena pencapaian dan keberhasilan kalurahan dalam pengembangan wisata tidak hanya bergantung pada sumber daya alam dan budaya yang ada, tetapi juga dapat ikut serta keterlibatan dan komitmen warga masyarakat.

Dalam Pengembangan wisata pemerintah kalurahan hadir sebagai Lembaga motivator untuk mendukung dan mendorong keterlibatan warga masyarakat serta meningkatkan kualitas warga masyarakat setempat untuk ikut handel dalam pengelolaan wisata. Dengan demikian dalam wawancara Bersama Nur Hidayad selaku Carik Kalurahan Guwosari wawancara menyampaikan.

“Pemerintah Kalurahan Guwosari berperan sebatas dalam hal menyiapkan sumber daya manusia (SDM) atau personel yang dapat menjadi pengelola maupun pelaku usaha. Kami dari pihak pemerintah mendorong keterlibatan masyarakat melalui pemberian pelatihan dan sosialisasi guna mendukung usaha mereka agar dapat berkontribusi dalam pengembangan pariwisata Goa Selarong”. (Wawancara peneliti pada tanggal, 06 Mei 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya upaya dari Pemerintah Kalurahan Guwosari sebagai motivator untuk turut berperan dalam proses pengembangan wisata Goa Selarong melalui pendekatan pemberdayaan sumber daya manusia. Fokus utama pemerintah kalurahan terletak pada penguatan kapasitas masyarakat agar mampu berpartisipasi sebagai pelaku dalam aktivitas ekonomi yang terkait dengan sektor pariwisata. Hal ini dengan memberikan pelatihan, sosialisasi dan dukungan lainnya, pemerintah kalurahan dapat menginspirasi untuk mendorong aktif warga Masyarakat lokal dalam pengembangan wisata goa selarong, tentu ini merupakan bentuk partisipasi

institusional yang menunjukkan kesadaran bahwa pembangunan pariwisata yang berkelanjutan harus melibatkan masyarakat secara aktif.

Kebijakan untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat merupakan langkah awal yang positif. Dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis lokal, pelatihan tersebut dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun keterampilan teknis maupun pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kualitas layanan, pelestarian budaya, dan pengelolaan lingkungan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesinambungan dan relevansi materi pelatihan terhadap kebutuhan aktual pelaku usaha di lapangan.

Meski demikian, pernyataan ini juga menyiratkan bahwa peran kalurahan masih terbatas pada tataran persiapan dan dukungan sumber daya manusia. Keterlibatan pemerintah kalurahan belum sepenuhnya menjangkau aspek perencanaan strategis, pengelolaan destinasi, maupun pengambilan kebijakan yang lebih luas. Dalam praktik pembangunan partisipatif, idealnya peran pemerintah desa tidak hanya mendorong, tetapi juga memfasilitasi ruang dialog dan kolaborasi antara warga dan aktor eksternal seperti dinas pariwisata atau pelaku sektor swasta.

Di sisi lain, keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku usaha merupakan bagian penting dari penguatan ekonomi lokal. Ketika warga dibekali keterampilan dan pengetahuan yang memadai, mereka akan mampu mengembangkan usaha kecil seperti kuliner, kerajinan tangan, jasa pemandu, maupun homestay yang mendukung ekosistem wisata. Namun, tanpa dukungan

lanjutan seperti akses permodalan, pemasaran, dan kemitraan usaha, pelatihan yang diberikan dapat berhenti pada tahap teoritis tanpa dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perlu di cermati pula bahwa keberhasilan pembangunan wisata berbasis masyarakat sangat ditentukan oleh adanya integrasi antara kebijakan tingkat kalurahan dan program-program pemerintah kabupaten. Sinergi antar level pemerintahan ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan peran. Pemerintah kalurahan dapat berperan sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan yang berskala lebih besar, serta memastikan bahwa pelaku lokal memiliki posisi yang sejajar dalam tata kelola wisata.

Peran Pemerintah Kalurahan Guwosari dalam mendorong keterlibatan masyarakat melalui pelatihan merupakan langkah konstruktif dalam arah pembangunan wisata yang lebih inklusif. Namun, tantangan selanjutnya adalah bagaimana menjadikan pelatihan tersebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang yang terintegrasi dengan kebijakan pariwisata dan ekonomi lokal. Keterlibatan masyarakat seharusnya tidak berhenti pada tahap persiapan SDM, tetapi diperluas hingga pada penguatan posisi tawar dan partisipasi dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi pembangunan wisata.

Dalam wawancara Bersama bapak Rusdi selaku buka usaha warung makan di area wisata Goa Selarong menyampaikan.

“Ya kalau dari pemerintah kalurahan soal motivasi kurang tahu lagi, soalnya saya sebagai Masyarakat yang buka usaha disini tidak pernah dilibatkan dalam bentuk kegiatan pelatihan atau sosialisasi. Jadi Adapun dorongan dari pemerintah atau lainnya saya tidak tahu”.
(Wawancara peneliti pada tanggal, 09 Mei 2025)

Pernyataan ini merefleksikan adanya kesenjangan antara narasi partisipasi yang dibangun oleh pemerintah kalurahan dengan pengalaman nyata sebagian masyarakat yang berada di sekitar destinasi wisata. Meskipun secara struktural pemerintah telah membentuk kelembagaan seperti Pokdarwis dan menyelenggarakan pelatihan, faktanya tidak semua pelaku usaha lokal merasa dilibatkan secara langsung dalam proses tersebut. Situasi ini menggambarkan bahwa pelaksanaan partisipasi masih bersifat parsial dan belum menjangkau seluruh lapisan warga yang terdampak atau terlibat dalam ekosistem wisata.

Ketiadaan informasi dan ketidakikutsertaan dalam program pelatihan atau sosialisasi dapat berdampak pada menurunnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap pengelolaan pariwisata di wilayahnya. Hal ini berisiko memunculkan ketimpangan partisipasi antara kelompok yang terorganisir (misalnya, Pokdarwis) dengan warga lain yang secara mandiri membangun usaha di sekitar lokasi wisata. Dalam perspektif pembangunan partisipatif, hal ini menandakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan komunikasi dan distribusi program agar tidak hanya bersandar pada aktor-aktor formal, tetapi juga mencakup warga yang bergerak secara swadaya.

Pengalaman ini menunjukkan pentingnya membangun mekanisme yang lebih inklusif dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan desa, khususnya di sektor pariwisata. Pemerintah kalurahan perlu memperkuat strategi komunikasi publik serta memetakan ulang basis data pelaku usaha lokal, agar semua pihak yang memiliki peran, baik kecil maupun besar, mendapatkan akses yang setara terhadap informasi, pelatihan, dan pendampingan. Tanpa keterlibatan yang merata, pembangunan pariwisata berisiko kehilangan dimensi keadilannya, karena hanya menguntungkan segelintir kelompok dan meninggalkan yang lain dalam ketidakpastian.

Hal yang disampaikan oleh ibu ituk selaku Masyarakat yang buka usaha warung makan di sekitar wisata Goa Selarong. Dalam wawancara menyampaikan.

“Ya saya rasa tidak ada. Selama ini saya buka usaha di wisata Goa Selarong gak pernah saya ikut kegiatan dari kalurahan, jadi soal dorongan motivasi begitu saya rasa tidak ada”. (Wawancara peneliti pada tanggal, 21 Mei 2025)

Pernyataan ini mengungkapkan adanya jurang partisipatif yang dialami oleh sebagian masyarakat pelaku usaha di sekitar kawasan wisata Goa Selarong. Ketidakterlibatan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan menandakan belum meratanya distribusi informasi dan akses terhadap program pembangunan yang seharusnya inklusif. Dalam perspektif pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development*), hal ini merupakan tantangan serius karena menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan belum menyentuh seluruh elemen pelaku lokal secara adil.

Ketiadaan dorongan atau motivasi dari pemerintah, sebagaimana dirasakan oleh pelaku usaha tersebut, bisa menjadi cerminan dari lemahnya komunikasi dan minimnya forum interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat nonformal yang tidak tergabung dalam kelembagaan resmi seperti Pokdarwis. Padahal, para pelaku usaha mandiri ini sejatinya adalah ujung tombak penggerak ekonomi mikro di sektor pariwisata. Ketika mereka merasa tidak berakomodasi, maka kehadiran pemerintah bisa dianggap bersifat eksklusif dan berjarak, bukan sebagai fasilitator yang merangkul semua kalangan.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah kalurahan untuk melakukan refleksi dan pemetaan ulang terhadap pola pelibatan masyarakat. Tidak semua kontribusi warga muncul dari struktur formal, dan justru banyak potensi yang tumbuh secara organik dari inisiatif individu seperti pelaku UMKM lokal. Untuk membangun ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang lebih dialogis, transparan, serta kesediaan untuk menjangkau suara-suara pinggiran yang selama ini belum terdengar. Hal ini akan memperkuat rasa memiliki terhadap program desa, sekaligus membangun kepercayaan sosial antara warga dan pemerintah setempat.

E. Pemerintah Kalurahan sebagai Inovator dalam Pengembangan Wisata

Goa Selarong

Pemerintah kalurahan memiliki peran strategis sebagai agen pelopor dalam pengembangan wisata. Pemerintah kaluraha juga tidak hanya sebagai agen pelopor juga menghadirkan ide-ide yang baru secara pendekatan kreatif

dan menimbulkan solusi yang praktis untuk mendorong kemajuan pengembang wisata. Pemerintah desa dituntut untuk berkreatif dalam berfikir dan bertindak progresif dalam menciptakan program baru yang mampu meningkatkan daya Tarik wisata. Dalam Langkah-langkah progresif dan inovatif tentu menjadi penggerak utama dalam menciptakan wisata yang tidak hanya menguntungkan kemenarikan, tetapi juga ada berkelanjutan dan berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan warga masyarakat.

Pengembangan wisata pemerintah kalurahan hadir sebagai Lembaga yang inovatif untuk pengelolaan wisata agar dapat menjadi penopang dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan pengelolaan wisata yang menarik. Tanpa peran inovatif kalurahan akan sulit untuk bersaing dalam pengelolaan dan pengembangan wisata yang terus berkebang pada wisata lainnya.

Dengan demikian, dalam wawancara Bersama Nur Hidayad selaku Carik Kalurahan Guwosari menyampaikan.

“Ya, kami berusaha berinovasi dengan memanfaatkan potensi yang ada seperti Wisata Banjaran dan Wisata Goa selarong itu sendiri dan beberapa potensi lainnya. Jadi di wisata Goa Selarong yang walaupun bukan kewenangannya kami dari Pemerintah Kalurahan karena sudah diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas pariwisata, tetapi kami juga membantu untuk mempromosikan secara langsung maupun secara online, jadi kami buat website kalurahan Guwosari untuk mempromosikan dan membuka akses informasi wisata”. (Wawancara peneliti pada tanggal, 06, Mei 2025)

Pernyataan ini mencerminkan semangat proaktif Pemerintah Kalurahan Guwosari dalam mengelola dan memajukan sektor pariwisata meskipun terbatas secara kewenangan formal. Upaya untuk berinovasi melalui

pemanfaatan berbagai potensi lokal, termasuk Wisata Banjaran dan Goa Selarong, menunjukkan adanya kesadaran institusional untuk tidak hanya bergantung pada struktur kewenangan, tetapi juga mengambil peran strategis dalam mendukung pengembangan destinasi. Meskipun pengelolaan Goa Selarong telah diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kalurahan tetap menunjukkan komitmen kolektif untuk memajukan kawasan tersebut melalui jalur non-struktural seperti promosi dan komunikasi publik.

Langkah pembuatan dan pemanfaatan website Kalurahan sebagai media promosi wisata menjadi bukti konkret dari adopsi teknologi digital dalam tata kelola desa. Strategi ini sejalan dengan pendekatan e-government dan digitalisasi pelayanan publik, yang tidak hanya berfungsi untuk efisiensi administrasi, tetapi juga sebagai jembatan informasi antara desa dan masyarakat luas, termasuk wisatawan. Dengan membuka akses informasi secara online, pemerintah kalurahan turut berkontribusi terhadap peningkatan visibilitas destinasi wisata serta memberikan peluang lebih besar bagi pelaku usaha lokal untuk dikenal lebih luas.

Namun demikian, inovasi digital semacam ini juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai serta sinergi dengan pelaku-pelaku lokal lainnya agar tidak berhenti pada aspek promosi saja. Perlu ada kesinambungan antara kegiatan promosi dengan pemberdayaan masyarakat, penyediaan konten berkualitas, serta integrasi dengan platform promosi pariwisata di tingkat kabupaten. Dengan demikian, meskipun berada dalam keterbatasan kewenangan, Pemerintah Kalurahan tetap bisa memainkan peran

signifikan sebagai penggerak inovasi dan pelaku sinergi antar-tingkat pemerintahan dalam pengembangan pariwisata yang partisipatif dan berkelanjutan.

Dalam wawancara Bersama Ibu Tri Sugianti selaku usaha buat patung di sekitar wisata Goa Selarong. Dalam wawancaranya menyampaikan.

“Dulu memang pernah ada. Terkadang terdapat pameran seni yang diselenggarakan di tingkat kabupaten, di mana dalam kegiatan tersebut juga terdapat pasar rakyat. Dalam kesempatan itu, pemerintah kalurahan kami turut berpartisipasi dengan menyelenggarakan kegiatan Tampil Desa yang menampilkan berbagai jenis kerajinan. Kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk promosi produk lokal masyarakat”.
(Wawancara peneliti pada tanggal, 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menggambarkan adanya inisiatif partisipatif yang pernah dilakukan oleh pemerintah kalurahan melalui keterlibatan dalam kegiatan pameran seni dan pasar rakyat tingkat kabupaten. Kegiatan seperti Tampil Desa, yang menampilkan kerajinan lokal, menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan pernah berupaya memfasilitasi masyarakat dalam mempromosikan produk-produk lokal. Langkah ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap potensi ekonomi kreatif di tingkat desa sebagai bagian dari pengembangan sektor pariwisata.

Dari sudut pandang pembangunan berbasis masyarakat, partisipasi dalam event promosi seperti ini sangat penting untuk memberikan eksposur kepada pelaku UMKM lokal. Selain sebagai ruang promosi, kegiatan tersebut juga berfungsi sebagai media untuk membangun kepercayaan diri masyarakat dalam menampilkan hasil karyanya di ruang publik. Hal ini dapat memicu tumbuhnya

semangat kewirausahaan dan memperluas jejaring sosial maupun ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kawasan wisata.

Namun, yang juga perlu dicermati adalah sifat dari kegiatan tersebut yang tampaknya hanya bersifat insidental dan belum menjadi agenda berkelanjutan. Dalam konteks tata kelola pariwisata yang inklusif, penting bagi pemerintah kabupaten maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan program jangka panjang yang terstruktur dan memiliki dampak berkelanjutan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan promosi harus diarahkan pada strategi pemasaran yang konsisten agar manfaatnya tidak hanya bersifat sesaat.

Keterlibatan dalam pameran kabupaten juga membuka ruang kerja sama antara pemerintah tingkat desa dan kabupaten. Namun demikian, pelibatan ini sebaiknya tidak hanya bersifat representatif atau simbolik, melainkan dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi secara jelas. Pemerintah kabupaten dapat berperan sebagai fasilitator yang menjembatani antara kepentingan warga dan peluang-peluang promosi atau pemasaran yang tersedia di tingkat regional.

Dari sisi masyarakat, kegiatan seperti ini menunjukkan adanya potensi sosial dan budaya yang bisa diangkat dalam konteks pariwisata. Kerajinan lokal tidak hanya bernilai secara ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat yang perlu dijaga dan dikembangkan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat ekosistem usaha kerajinan dengan pelatihan berkelanjutan, inovasi desain, dan akses terhadap pasar yang lebih luas.

Dengan demikian, keterlibatan Pemerintah Kalurahan Guwosari dalam kegiatan promosi seperti Tampil Desa merupakan contoh nyata upaya pemberdayaan masyarakat melalui jalur ekonomi kreatif. Namun, keberlanjutan dan konsistensi program menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kerja kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, komunitas lokal, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa kegiatan promosi ini dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif.

Hal yang disampaikan oleh Ibu Suarni selaku Masyarakat yang buka usaha di wisata Goa Selarong. Dalam wawancara menyampaikan.

“Kalau dari pemerintah kalurahan kami sebagai Masyarakat diberikan kemudahan mengakses lokasi untuk membuka usaha di sekitar wisata Goa Selarong. Dengan adanya wisata Goa Selarong ini cukup memberikan manfaat untuk kami Masyarakat sebagai pelaku usaha disini”. (Wawancara peneliti pada tanggal, 09 Mei 2025)

Pernyataan ini mencerminkan adanya relasi positif antara pemerintah kalurahan dan masyarakat lokal dalam konteks penyediaan akses ruang usaha di sekitar kawasan wisata Goa Selarong. Pemerintah kalurahan tampaknya tidak hanya berfungsi sebagai regulator administratif, tetapi juga sebagai fasilitator ruang ekonomi yang memungkinkan masyarakat setempat untuk tumbuh dan berkembang melalui kegiatan usaha mikro. Kemudahan akses tersebut menjadi bentuk dukungan tidak langsung yang bersifat strategis, karena memungkinkan masyarakat memanfaatkan arus kunjungan wisata untuk meningkatkan pendapatan secara mandiri.

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat pelaku usaha menunjukkan bahwa pariwisata memiliki efek ekonomi yang nyata di tingkat lokal. Goa Selarong, meskipun secara kewenangan dikelola oleh pemerintah kabupaten, tetap menjadi sumber penghidupan bagi warga desa yang tinggal di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa dampak pariwisata tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki kewenangan administratif, tetapi juga oleh bagaimana ekosistem sosial-ekonomi di sekitarnya mampu memanfaatkan peluang yang tercipta. Dalam kerangka local economic development (LED), situasi ini menjadi contoh bagaimana destinasi wisata dapat menjadi titik tumpu pertumbuhan ekonomi komunitas apabila diiringi oleh kebijakan yang inklusif.

Namun, agar manfaat ini terus berkelanjutan dan merata, pemerintah kalurahan perlu mengembangkan sistem pendampingan yang lebih menyeluruh kepada pelaku usaha lokal, tidak hanya berhenti pada pemberian akses lokasi. Pendampingan tersebut dapat berupa pelatihan manajemen usaha, peningkatan kualitas produk dan layanan, hingga promosi berbasis komunitas. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya bergantung pada kuantitas wisatawan, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah yang memperkuat daya saing usaha mereka. Keberlanjutan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan lokal mampu memperkuat kapasitas warga sebagai pelaku utama pembangunan.

Hal yang disampaikan oleh bapak rusdi selaku Masyarakat yang buka usaha warung makan di area Goa Selarong. Dalam wawancara menyampaikan.

“Ya dengan adanya wisata Goa Selarong ini cukup memberikan topangan soal kebutuhan hidup sehari-hari

kami sebagai Masyarakat yang buka usaha di area wisata. Cuma dari pemerintah kalurahan kurang perhatian terhadap Masyarakat untuk mendorong dalam pengembangan wisata”.(Wawancara peneliti pada tanggal, 09 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberadaan wisata Goa Selarong memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal, khususnya mereka yang membuka usaha di sekitar kawasan wisata. Aktivitas ekonomi yang tumbuh secara alami di sekitar destinasi ini telah menjadi sumber penghidupan harian yang penting, memperlihatkan bagaimana sektor pariwisata dapat menjadi penopang ekonomi rakyat kecil. Dalam konteks pembangunan berbasis komunitas, kondisi ini mencerminkan bahwa masyarakat memiliki daya adaptif yang cukup tinggi dalam merespons peluang ekonomi yang hadir di lingkungan sekitarnya.

Namun, ungkapan tentang “kurangnya perhatian dari pemerintah kalurahan” menyiratkan adanya jarak antara potensi inisiatif warga dan dukungan institusional dari pemerintah desa. Meskipun warga telah membuktikan kapasitasnya dalam mengelola usaha secara mandiri, ketiadaan dorongan aktif dari pemerintah, baik dalam bentuk pelatihan, pendampingan, maupun promosi terpadu, berisiko membuat geliat ekonomi lokal tidak berkembang secara maksimal. Dalam pendekatan bottom-up development, pemerintah kalurahan seharusnya tidak hanya bertindak sebagai penyedia ruang fisik, tetapi juga sebagai penggerak yang secara aktif menjembatani kebutuhan masyarakat dengan sumber daya dan kebijakan yang tersedia.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah kalurahan untuk mengembangkan model tata kelola wisata yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemberdayaan. Ketika warga sudah menunjukkan inisiatif dalam membangun usaha, dukungan pemerintah tidak lagi bersifat pilihan, melainkan keharusan moral dan administratif. Dukungan ini tidak harus bersifat besar atau kompleks; cukup dengan membangun komunikasi yang intensif, menyediakan pelatihan sederhana, atau menciptakan forum dialog antar pelaku usaha. Langkah-langkah kecil namun konsisten ini dapat menciptakan ekosistem wisata yang inklusif, di mana keberhasilan sektor pariwisata benar-benar menjadi milik bersama, bukan hanya segelintir pihak.

BAB IV

PENUTUP

Setelah peneliti melakukan penelitian, maka dalam bab ini sebagai bab terakhir untuk menarik kesimpulan atas hasil penelitian yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya. Dalam hal ini, penarikan kesimpulan akan didasari beberapa dengan fokus penelitian sebagai point penting yang sudah dibahas.

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian, maka dalam bab ini sebagai bab terakhir untuk menarik kesimpulan atas hasil penelitian yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya. Dalam hal ini, penarikan kesimpulan akan didasari beberapa dengan fokus penelitian sebagai point penting yang sudah dibahas.

1. Pemerintah Kalurahan sebagai fasilitator dalam pengembangan wisata Goa Selarong

Pemerintah Kalurahan Guwosari dalam pengembangan wisata Goa Selarong mengalami pergeseran signifikan, dari semula sebagai pengelola langsung menjadi mitra pendukung. Pergeseran ini terjadi seiring dengan dialihkannya kewenangan pengelolaan wisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Meskipun pemerintah kalurahan masih memiliki posisi strategis sebagai fasilitator di tingkat lokal, keterbatasan kewenangan secara formal telah mengurangi efektivitas intervensi langsung terhadap pengembangan wisata. Situasi ini mencerminkan gejala pemerintahan semu, di mana pemerintah kalurahan terlihat aktif dalam wacana pengembangan, namun minim otoritas dan sumber daya dalam praktiknya.

Pemerintah desa tampak berperan secara administratif dan simbolis, tetapi tidak dilibatkan secara substansial dalam pengambilan keputusan strategis. Hal ini mengindikasikan perlunya penataan ulang relasi kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah kalurahan agar prinsip desentralisasi benar-benar berjalan secara partisipatif dan fungsional, khususnya dalam pengelolaan potensi wisata berbasis lokal.

2. Kebijakan Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan wisata Goa Selarong

Pengelolaan wisata Goa Selarong saat ini sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pariwisata. Di satu sisi, ini dapat memberikan kepastian hukum dan standar pelayanan publik yang lebih seragam. Namun di sisi lain, hal ini juga berpotensi mereduksi peran pemerintah kalurahan yang lebih dekat dengan masyarakat setempat. Akibatnya, ada jarak antara kebijakan teknokratis dengan realitas sosial di tingkat akar rumput, di mana masyarakat sesungguhnya menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem wisata.

3. Pengorganisasian dalam pengembangan wisata Goa Selarong

Pemerintah kalurahan Guwosari telah mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan sektor pariwisata dengan melakukan pembentukan kelembagaan seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan penguatan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal). Ini menjadi bentuk nyata dari model pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek, tetapi subjek dari

pembangunan itu sendiri. Di tengah keterbatasan tersebut, semangat kolaboratif yang dibangun oleh Pemerintah Kalurahan patut diapresiasi sebagai model kepemimpinan lokal yang adaptif dan transformatif. Keterlibatan Pokdarwis yang diorganisir langsung oleh pemerintah kalurahan menjadi bukti kongkret bahwa ada niat untuk memperkuat kelembagaan sosial di tingkat lokal. Tetapi juga memastikan adanya transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas warga.

4. Pemerintah Kalurahan sebagai motivator dalam pengembangan wisata Goa Selarong

Pemerintah Kalurahan Guwosari sebagai motivator turut berperan dalam membangun keterampilan teknis maupun pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kualitas layanan, pelestarian budaya, dan pengelolaan lingkungan. Di sisi lain, keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku usaha merupakan bagian penting dari penguatan ekonomi lokal. Namun, tanpa dukungan lanjutan seperti akses permodalan, pemasaran, dan kemitraan usaha, pelatihan yang diberikan dapat berhenti pada tahap teoritis tanpa dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat keterlibatan masyarakat seharusnya tidak berhenti pada tahap persiapan SDM, tetapi diperluas hingga pada penguatan posisi tawar dan partisipasi dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi pembangunan wisata. Tentu saja secara struktural pemerintah telah membentuk kelembagaan seperti Pokdarwis dan menyelenggarakan pelatihan, faktanya tidak semua pelaku usaha lokal merasa dilibatkan secara langsung dalam proses tersebut.

5. Pemerintah Kalurahan sebagai inovator dalam pengembangan wisata Goa Selarong

Pemerintah Kalurahan Guwosari dalam mengelola dan memajukan sektor pariwisata meskipun terbatas secara kewenangan formal. Meskipun pengelolaan Goa Selarong telah diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kalurahan tetap menunjukkan komitmen kolektif untuk memajukan kawasan tersebut melalui jalur non-struktural seperti promosi dan komunikasi publik. Strategi ini sejalan dengan pendekatan e-government dan digitalisasi pelayanan publik, yang tidak hanya berfungsi untuk efisiensi administrasi, tetapi juga sebagai jembatan informasi antara desa dan masyarakat luas, termasuk wisatawan. Dengan demikian, meskipun berada dalam keterbatasan kewenangan, Pemerintah Kalurahan tetap bisa memainkan peran signifikan sebagai penggerak inovasi

B. Saran

1. Penting untuk membangun pola kemitraan yang lebih sinergis antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kalurahan, masyarakat lokal, dan pelaku usaha.
2. Pemerintah Kabupaten, perlu memberikan ruang peran yang lebih luas bagi Pemerintah Kalurahan Guwosari dalam pengelolaan aspek-aspek wisata.
3. Pemerintah Kalurahan harus menggandeng perguruan tinggi, LSM, atau mitra swasta untuk memberikan pelatihan, pendampingan dan akses lanjutan seperti modal usaha, akses pasar, dan jaringan kemitraan bisnis.

4. Peran Pokdarwis dan BUMKal harus diperkuat tidak hanya secara struktural, tetapi juga dalam hal fungsi dan kapasitas serta memfasilitasi dalam pelatihan konten digital dalam promosi destinasi secara kreatif dan berkelanjutan.
5. Diperlukan sistem pemantauan dan evaluasi semua program dan kegiatan pengembangan wisata, baik oleh Pemerintah Kabupaten maupun Kelurahan

DAFTAR PUSTAKA

- Al Araf, A., Jamal, M., & Surya, I. (2022). Peran Kepala Desa Dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Luan Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 77–86.
- Alfianto, F. Y. (2021). Peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Pakuncen. *Paradigma*, 10(1).
- Ariska Sari, T., & Priyanti, E. (2022). Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Perangkat Desa Telukjambe Kabupaten Karawang Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(21), 428–439.
- Bowo, K. (2022). Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Dan Kinerja Hasil Rekrutmen (Skripsi). Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".
- Darmatasia, F., Irawan, B., & Apriani, F. (2020). Upaya Pengembangan Pariwisata Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. *Ejournal Administrasi Publik*, 8(1), 8707–8718.
- Dewi, R. I., & Khairan, W. (2024). Peran Pemerintah Desa Sedau Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Gunung Jae. *Jurnal Sikap (Solusi Ilmiah Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 11(1), 18–26.
- Fahira, N. S., Umar, R., & Habibi, M. M. (2022). Peran Pemerintah Desa Purworejo Dalam Pengembangan Wisata Alam Sumber Complang Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(3), 291–303.
- Hamid, A. (2014). Meningkatkan Pemahaman Siswa Pada Materi Hubungan Garis Dan Sudut Melalui Penerapan Metode Penemuan Terbimbing. *Jurnal Untad*, 17(2).
- Herfino, I. T., Sugiyanto, S., & Likustyawati, H. (2020). Aktivitas fisik pemain reog Ponorogo Jawa Timur. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains*, 1(1).
- Hidayat, E. S., & Djadjuli, R. D. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam

- Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 277–293.
- Idrus, I. A., & Hakim, M. L. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Wisata Sawah Desa Gunung Mulia Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. *Parapolitika: Journal of Politics and Democracy Studies*, 5(1), 1–13.
- Indrawan, B., & Dewi, R. K. (2020). Pengaruh net interest margin (NIM) terhadap return on asset (ROA) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk periode 2013–2017. *Jurnal E-Bis*, 4(1), 78–87.
- Iswanti, S. I., & Zulkarnaini, Z. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 92–103.
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Oka Prasiasa, D. P. (2022). Pengembangan Daerah Wisata dalam Bingkai Politik Pariwisata. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 3(1), 55–68.
- Pendong, A., Singkoh, F., & Pangemanan, F. (2020). Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Gunung Payung Di Desa Poopo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Purnawati, L., & Putri, O. I. (2019). Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Masyarakat Desa Waung (Studi Pada Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). *Publiciana*, 12(1), 70–92.
- Rahma, G., Andra, A., Aisyah, A. P., Adha, N. S., Ahda, F., & Kamil, M. W. (2024). Hegemoni Pemerintah Dalam Kebijakan Penghentian Izin Reklamasi Pantai Teluk Utara Jakarta Berdasarkan Teori Antonio Gramsci. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(2).
- Rihadatul'Ais, N. A. (2020). Optimalisasi Peran Front Desk Agent Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima di JW Marriott Hotel Surabaya (Skripsi). Universitas Airlangga.

- Sawir, M., & Pende, H. H. (2020). Peran Pemerintah Desa Lalos Dalam Mengembangkan Obyek Wisata Pantai Batu Bangga. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 2(1).
- Sopyan, M., Nursetiawan, I., & Garis, R. R. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Pasir Bentang Di Desa Sukamnah Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 66–78.
- Subagja, A. D., & Firdaus, D. (2023). Pengaruh Harga Terhadap Kepuasan Tamu Hotel di Sari Alam *Hot Spring and Resort Hotel Subang*. *The World of Business Administration Journal*.
- Takome, S., Suwu, E. A. A., & Zakarias, J. D. (2021). Dampak Pembangunan Pariwisata Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Lokal di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(1).
- Vany, L. O. R. R., Nastia, N., & Basir, M. A. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di Desa Lasori Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4(4), 266–270.
- Yeyet, N. (2019). Peran Pemerintah Desa dalam Pembinaan Karang Taruna di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 260–269.

Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10. Tahun 2009. Tentang Kepariwisata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa."
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025
- Peraturan Bupati Bantul (Perbup) Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga

LAMPIRAN
PANDUAN WAWANCARA
PEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARI

A. Identitas Responden

- Nama :
- Jabatan :
- Instansi/Lembaga :
- Waktu & Tempat Wawancara :

B. Pemerintah Kalurahan sebagai fasilitator dalam pengembangan wisata Goa Selarong

- Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam memfasilitasi pengembangan wisata Goa Selarong?
- Bentuk fasilitasi apa saja yang sudah diberikan (misalnya: akses jalan, pelatihan, promosi, sarana prasarana)?
- Apakah Pemerintah Desa menjalin kerja sama dengan pihak lain? Jika ya, dengan siapa saja?

C. Pemerintah Kalurahan sebagai fasilitator dalam pengembangan wisata Goa Selarong

- Apakah ada peraturan atau kebijakan dari Pemerintah Desa yang mendukung pengembangan Goa Selarong?
- Bagaimana proses pembuatan kebijakan tersebut? Apakah masyarakat dilibatkan?
- Sejauh ini, bagaimana implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut?

D. Pengorganisasian dalam pengembangan wisata Goa Selarong

- Bagaimana struktur pengelolaan wisata Goa Selarong di tingkat desa?
- Siapa saja pihak yang terlibat (misalnya: BUMKAL, kelompok sadar wisata, karang taruna)?
- Apa bentuk dukungan administratif atau kelembagaan dari Pemerintah Desa?

E. Pemerintah Kalurahan sebagai motivator dalam pengembangan wisata Goa Selarong

- Apa saja upaya Pemerintah Desa dalam memotivasi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pengembangan wisata?
- Adakah bentuk penghargaan, pelatihan, atau kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat?
- Bagaimana respon dan keterlibatan masyarakat selama ini?

F. Pemerintah Kalurahan sebagai inovator dalam pengembangan wisata Goa Selarong

- Apakah Pemerintah Desa memiliki gagasan atau inovasi baru untuk mendukung pengembangan Goa Selarong?
- Inovasi seperti apa yang sudah atau sedang dirancang (misal: digitalisasi promosi, paket wisata edukatif, dll)?
- Bagaimana desa menyesuaikan inovasi dengan kearifan lokal dan kebutuhan wisatawan?

PANDUAN WAWANCARA
MASYARAKAT DAN PENGELOLA WISATA GOA SELARONG

A. Identitas Responden

- Nama :
- Usia :
- Jenis Kelamin :
- Waktu & Tempat Wawancara :

B. Pengetahuan dan Persepsi Masyarakat

- Sejak kapan Bapak/Ibu mengetahui tentang wisata Goa Selarong?
- Apa pendapat Bapak/Ibu tentang keberadaan Goa Selarong sebagai tempat wisata?
- Menurut Bapak/Ibu, apa yang menjadi daya tarik utama dari Goa Selarong?

C. Keterlibatan dan Partisipasi

- Apakah Bapak/Ibu atau keluarga pernah terlibat dalam kegiatan pengembangan wisata (seperti berdagang, menyewakan lahan, bekerja di sektor wisata, dll)?
- Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat lainnya dalam mendukung wisata Goa Selarong?
- Menurut Bapak/Ibu, apakah Pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam pengembangan wisata?

D. Manfaat yang Dirasakan

- Apakah keberadaan wisata Goa Selarong membawa manfaat bagi kehidupan ekonomi Bapak/Ibu? Jika ya, dalam bentuk apa?
- Selain manfaat ekonomi, adakah dampak sosial atau budaya yang Bapak/Ibu rasakan?

E. Tantangan atau Keluhan

- Apakah ada dampak negatif dari kegiatan pariwisata yang Bapak/Ibu rasakan (misal: sampah, kebisingan, gangguan aktivitas sehari-hari)?
- Apa yang menurut Bapak/Ibu perlu diperbaiki dalam pengelolaan wisata Goa Selarong?

F. Harapan dan Saran

- Apa harapan Bapak/Ibu terhadap masa depan Goa Selarong sebagai destinasi wisata?
- Menurut Bapak/Ibu, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau pengelola agar masyarakat lebih sejahtera dan wisata tetap terjaga?

LAMPIRAN DOKUMENTASI



